



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEMPATAN KERJA DI SUMATERA BARAT (1996-2010)

SKRIPSI



ARIF SAPUTRA
07 151 086

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesempatan Kerja di Sumatera Barat (1996-2010) Merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberi pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan *plagiat* dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 10 Oktober 2012

Yang memberi pernyataan,



Arif Saputra

07151086





KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, yang memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Di Sumatera Barat (1996-2010)”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari tahap awal sampai pada tahap akhir, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini ;

1. ALLAH SWT, karena rahmat dan kasih sayangNya penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini, tanpa rahmat dan kasih sayangNya mustahil bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr.Nasri Bachtiar,SE,MS selaku pembimbing penulis, dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih bapak telah memberikan arahan dan telah membentuk pola pikir penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Prof.Dr.Tafdil Husni,SE.MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE.M.Ec.DEA.Ing selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak Febriandi Prima Putra,SE,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, yang telah memberikan waktunya untuk mendengarkan keluhan penulis, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibuk Dra,Syukriati Syukur,MS yang telah berkenan untuk menjadi tim penguji skripsi ini
7. Bapak Edi Ariyanto SE,M.Si yang telah berkenan menjadi tim penguji skripsi ini, selain itu penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada bapak yang telah memberikan banyak pelajaran, dan terima kasih atas ilmu-ilmu yang bapak berikan.
8. Ibu Neng Kamarni,SE.M.Si selaku dosen pembimbing akademik penulis selama mengikuti studi di Jurusan Ilmu Ekonomi Univesitas Andalas.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi secara umumnya dan Bapak-Ibu Dosen Ilmu Ekonomi secara khusus yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengajaran kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal bagi bapak dan ibu nantinya.
10. Bapak ibuk karyawan dan karyawanati Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas, terima kasih banyak, semoga kebaikan bapak dan ibuk dibalas oleh ALLAH SWT nantinya, amin.
11. Bapak karyawan/karyawanati BPS yang telah membantu penulis dalam menyediakan segala data yang dibutuhkan penulis, terima kasih atas bantuannya.
12. Kepada seluruh teman-teman seangkatan ,sapaik, sapamainan ; m.rizki, wedi chombro, rivo chombro, qtiang puyol, rezi ariel NOAH, izoelfikri, chuqiang, wahyu sanak, afrizal, raju amaik, almarhum sahabatqu hery, ajo tija, angga olga, pangeran, indera cees, weri, dayat anal, dayat firman, ayad papi, jabenk, aripin karean, andri ucok, andri BNI, EE, eka, imel one, Imelda, okti, aya, aaw, hesty, chelsy, reno, nia(almarhumah), febi, nurjihan, fera, dan seluruh teman-teman angkatan EP 2007 yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terima kasih semuanya,atas kebersamaan,dan segala bentuk bantuannya,tanpa kalian hari-hari penulis di kampus akan terasa hampa. Sukses untuk kita semua !!!!!
13. Kepada senior-senior 05 tercinta, Fathan SE, Rosid, SE, Ganto, SE, AVE,SE, Senior 06 , dan semua rekan2 08,09,10,11,12, bravo untuk EP

14. Teman-teman kos Haji Padi semua angkatan dari awal kuliah sampai saat ini, sedih untuk berpisah dengan kalian, semoga kebersamaan ini berlanjut di masa-masa mendatang, I LOVE U ALL....

Akhir kata, penulis berharap ALLAH SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah menemani kebersamaan penulis selama masa kuliah di Universitas Andalas. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis terbuka dalam menerima kritik dan saran demi sempurnanya skripsi ini di masa-masa mendatang, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan nantinya.

Padang, 10 Oktober 2012

Penulis

(Arif Saputra)



	No. Alumni Universitas	Arif Saputra	No. Alumni Fakultas
	BIODATA a) Tempat/Tanggal Lahir : Sumanik/ 22 September 1989 b) Nama Orang Tua : Nasrizal dan Desmawati c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) No. BP : 07151086 f) Tanggal Lulus: 26 Juli 2012 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK : 3.08 i) Lama Sudi : 4 tahun 10 bulan j) Alamat Orang Tua: Sungai Guntung, Inderagiri Hilir, Riau		

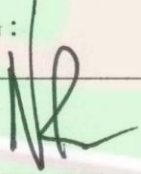
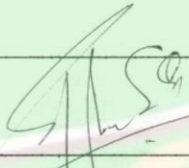
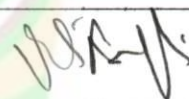
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEMPATAN KERJA DI SUMATERA BARAT (1996-2010)
Skripsi S1 Oleh Arif Saputra

Pembimbing Prof,Dr,Nasri Bachtiar,SE,MS
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana trend perkembangan kesempatan kerja di Sumatera Barat, menganalisis pengaruh investasi, kebijakan upah minimum regional, serta pelaksanaan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat selama periode tahun 1996-2010. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan observasi kepustakaan atau studi pustaka, yaitu dengan mengambil data-data dan catatan yang ada pada lembaga atau instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Investasi Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat sedangkan variabel-variabel lain didapatkan tidak signifikan, sedangkan variabel upah minimum memiliki pengaruh yang negatif terhadap kesempatan kerja, fakta lain yang didapat adalah ternyata pelaksanaan UU No 13 tahun 2003 ternyata belum mampu meningkatkan kesempatan kerja di Sumatera Barat. Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi yang bersifat padat karya agar investasi yang ada mampu memberikan dampak yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga mampu mengurangi angka pengangguran di Sumatera Barat.

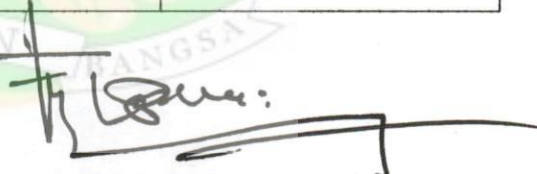
Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juli 2012

Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan.	1. 	2. 	3. 
Nama Terang	Prof,Dr,Nasri Bachtiar,SE,MS	Dra.Syukriati Sy,MS	Edi Ariyanto,SE,M.Si

Mengetahui,

Ketua Jurusan Prof.Dr.H. Firwan Tan, SE,M.Ec.DEA.Ing
NIP. 130 812 952


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No.Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No.Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

DAFTAR ISI

ABSTRAK

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan	6

BAB II LANDASAN TEORI DAN STUDI LITERATUR

2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Konsep Pertumbuhan Penduduk	8
2.1.2 Tenaga Kerja	12
2.1.3 Ketenagakerjaan.....	20
2.1.4 Indikator Kesempatan Kerja	21
2.1.5 Konsep Investasi	23
2.1.6 Upah minimum regional	26
2.1.6 Undang-undang tenaga kerja.....	28

2.2 Studi Literatur	29
2.3 Hipotesis.....	32
2.4 Kerangka Pemikiran	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data	34
3.2 Identifikasi Variabel	34
3.3 Metode Analisa dan Pembentukan Model	35
3.3.1 Analisa Deskriptif dan Induktif.....	35
3.3.2 Analisis Regresi Berganda Metode Analisis Data	35
3.4 Uji statistik	38
3.5 Defenisi Operasional Variabel	42

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Keadaan Geografis	44
4.2 Perkembangan Perekonomian Makro Sumatera Barat	45
1) Tingkat Investasi	48
2) Kesempatan Kerja di Sumatera Barat	50
3) Upah Minimum Regional di Sumatera Barat.....	52

BAB V PENEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Analisa tren perkembangan kesempatan kerja di Sumatera Barat	55
5.2 Identifikasi Variabel	60
5.3 Penemuan Empiris	61
5.4 Uji Statistik	63

5.4.1 Pengaruh Investasi Pemerintah Terhadap Kesempatan Kerja di Sumatera Barat	64
5.4.2 Pengaruh Investasi Swasta (PMA & PMDN) Terhadap Perkembangan Kesempatan Kerja di Sumatera Barat	64
5.3.3 Pengaruh UMR terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat	65
5.3.4 Pengaruh UU No 13 Tahun 2003 terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat	66
5.4 Uji Asumsi Klasik	66
5.4.1 Uji Normalitas data	66
5.4.2 Uji Multikolonearitas	67
5.4.3 Uji Heteroskedastisitas	68
5.4.4 Uji Autokorelasi	69
5.5 Implikasi Kebijakan	71
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	76
6.2 Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah dan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 Provinsi Sumatera Barat 1996-2010.....	46
Tabel 4.2	Nilai investasi Pemerintah atas harga konstan dan realisasi PMDN dan PMA Provinsi Sumatera Barat 1996-2010.....	49
Tabel 4.3	Perkembangan Kesempatan Kerja di Sumatera Barat tahun 1995-2010.....	52
Tabel 4.4	Perkembangan Upah Minimum Regional di Sumatera Barat.....	53
Tabel 5.1	Pertumbuhan Kesempatan kerja di Sumatera Barat.....	56
Tabel 5.2	Hasil Uji Multikoloniartitas.....	68
Tabel 5.3	Hasil Nilai Durbin Watson.....	70
Tabel 5.4	Kriteria Nilai Durbin Watson.....	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga Kerja.....	17
Gambar 2.2	Skema pengelompokan penduduk.....	19
Gambar 2.3	Kerangka pemikiran penelitian.....	33
Gambar 3.1	Daerah pengujian Autokorelasi dengan Uji Durbin Watson.....	38
Gambar 4.1	Perkembangan PDRB di Sumatera Barat 1995-2010.....	47
Gambar 4.2	Perkembangan Kesempatan Kerja di Sumatera Barat.....	51
Gambar 5.1	Pertumbuhan Kesempatan Kerja di Sumatera Barat 1996-2010.....	56
Gambar 5.2	Perbandingan Tren Pertumbuhan Investasi Pemerintah Dengan tren Pertumbuhan Kesempatan Kerja.....	57
Gambar 5.3	Perbandingan Tren Pertumbuhan PMA dengan Kesempatan Kerja (yoy) di Sumatera Barat 1996-2010.....	58
Grafik 5.4	Perbandingan Tren Pertumbuhan PMDN dengan Kesempatan Kerja di Sumatera Barat 1996-2010.....	60
Gambar 5.5	Hasil Uji Normalitas Sebaran Data.....	66
Gambar 5.6	Uji Heterosdekastisitas	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan yang memiliki sasaran untuk menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mampu dan berkembang menuju masyarakat adil dan makmur serta merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Todaro (2000), pembangunan memiliki arti luas yaitu suatu proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional maupun lokal dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan. Keberhasilan sebuah pemerintahan salah satunya dilihat dari seberapa jauh pemerintahan tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya, dengan penciptaan lapangan kerja yang tinggi akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat (Purwanti, 2009).

Masalah penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang dihadapi seluruh negara yang ada, baik negara maju maupun negara berkembang. Walaupun intensitas masalah tersebut berbeda-beda karena adanya perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti laju pertumbuhan ekonomi, teknologi yang digunakan, dan kebijaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah. Dilihat dari sudut pandang ekonomi makro, perluasan kesempatan kerja dapat

terjadi melalui pertumbuhan ekonomi yaitu melalui proses kenaikan output perkapita secara konstan dalam jangka panjang (Boediono, 1999).

Menurut Tjiptoherijanto (1996) masalah ketenagakerjaan dipengaruhi oleh jumlah penduduk, angkatan kerja dan kebijakan ketenagakerjaan itu sendiri. Masalah yang terjadi di Indonesia adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak bisa lagi mampu menampung jumlah angkatan kerja yang ada. ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak disertai dengan peningkatan jumlah lapangan kerja. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun (BPS, 2011).

Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2010 jumlah penduduk di Indonesia pada sepuluh tahun terakhir ini telah meningkat sebesar 1,49 %. Kenaikan jumlah penduduk otomatis jumlah angkatan kerja di Indonesia juga akan meningkat karena jumlah angkatan kerja ini berhubungan positif dengan banyaknya jumlah tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun yang sama yaitu berjumlah 105,80 juta jiwa.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan perbaikan iklim investasi. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (Untuk Regional Atau Daerah) yang dihasilkan di negara tersebut setiap tahunnya. Namun, fenomena yang sekarang terjadi di Indonesia adalah laju pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kemampuan menyerap tenaga kerja rendah. Ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi lebih banyak didorong oleh konsumsi

masyarakat yang besar bukan dari investasi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PDB Indonesia pada tahun 2007 berdasarkan jenis penggunaannya yang menunjukkan bahwa bahwa jumlah konsumsi rumah tangga kontribusinya adalah sebesar 57.56%. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pembentukan modal tetap yang kontribusinya hanya mencapai angka 22.46% dari total PDB (BPS, 2007).

Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000). Adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran (Prasojo, 2009). Dengan demikian terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut akan menambah output nasional sehingga akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

PDRB Sumatera Barat pada tahun 2010 jika dilihat dari sisi penggunaannya Konsumsi rumah tangganya memiliki kontribusi sebesar 49,08%. Konsumsi pemerintahnya adalah sebesar 13,31 %.sedangkan untuk pembentukan modal tetap kontribusinya hanya sebesar 19,12% dari total PDRB (BPS, 2010) hal ini menguatkan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat kontribusinya sebagian besar dari sisi konsumsi. Sehingga tidak mengherankan jika penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat belum sebanding dengan jumlah pencari kerja di Sumatera Barat. Pada bulan November 2010 jumlah pencari kerja

di Sumatera Barat mencapai angka 105.197 orang sedangkan tingkat penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya (BI, 2010).

Agar kesempatan kerja meningkat, maka pengeluaran pemerintah harus diarahkan kepada penyediaan *social over head* dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Pengeluaran seperti itu akan menciptakan lapangan kerja dan efisiensi produktifitas ekonomi. Investasi dari pihak swasta juga menentukan kegiatan produksi atau ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain ditentukan oleh besarnya investasi, kesempatan kerja juga ditentukan oleh tingkat upah.

Berdasarkan kenyataan diatas bisa dilihat bahwa kesempatan kerja merupakan masalah penting yang harus diperhatikan oleh semua kalangan di dalam suatu Negara agar tujuan pembangunan di Negara tersebut dapat tercapai, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja di Sumatera Barat, penelitian ini diberi judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja di Sumatera Barat”**.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah kesempatan kerja di Sumatera Barat merupakan masalah yang sangat besar dan kompleks. Besar karena menyangkut keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan khalayak umum. Komplek karena di pengaruhi oleh banyak faktor yang saling berintegrasi didalamnya. Pada tingkat makro, kesempatan kerja

sangat dipengaruhi oleh investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun investasi yang dilakukan oleh pihak swasta, serta tingkat upah.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana trend perkembangan kesempatan kerja di Sumatera Barat selama tahun 1996-2010?
- 2) Bagaimana pengaruh investasi, dan kebijakan upah minimum dan keluarnya UU ketenagakerjaan 2003 terhadap kesempatan kerja?
- 3) Implikasi kebijakan apa yang dapat disimpulkan dari pengaruh investasi, upah minimum dan keluarnya UU Ketenagakerjaan tahun 2003 terhadap perluasan kesempatan kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengevaluasi trend perluasan kesempatan kerja di Sumatera Barat selama periode tahun 1996-2010 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
- 2) Menganalisis pengaruh investasi, upah dan UU No 13 Tahun 2003 terhadap perluasan kesempatan kerja di Sumatera Barat
- 3) Menyusun implikasi kebijakan peningkatan investasi, upah terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi kegunaan teoritis dan praktis, sebagai berikut.

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan wadah untuk mengaplikasikan teori-teori ekonomi ekonomi sumber daya manusia untuk menganalisa berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja di Sumatera Barat seperti investasi dan tingkat upah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dalam meneliti masalah ketenagakerjaan.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan bidang pembangunan nasional khususnya dalam masalah ketenagakerjaan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan tercapai sasaran yang hendak dituju, maka ruang lingkup pembahasan perlu ditetapkan. Dalam penulisan ini penulis akan memberi batasan data yang digunakan adalah data sekunder berupa *time series* mulai dari tahun 1996 sampai 2010. Kesempatan kerja di Sumatera Barat menjadi variabel tidak bebas sedangkan investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah menjadi variable bebas.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari teori-teori yang digunakan serta penelitian-penelitian yang terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antar teori-teori yang digunakan dalam permasalahan yang akan diteliti.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan data dan sumber data, pembentukan model, definisi operasional variabel dan metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV

TINJAUAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, variabel-variabel serta pengukurannya. Selain itu juga dibahas mengenai metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V

PENEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Menguraikan tentang hasil penemuan empiris dari variabel-variabel yang diuji dan menjelaskan beberapa implikasi kebijakan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN STUDI LITERATUR

2.1 Landasan teori

2.1.1 Konsep Pertumbuhan Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (BPS).

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu di bandingkan waktu sebelumnya.

Apabila diperhatikan secara seksama, maka masalah kependudukan di Indonesia ditandai oleh beberapa ciri (karakteristik):

1. Besar dan cepatnya laju perkembangan penduduk

Seperti halnya negara-negara lain terutama negara-negara yang sedang berkembang, maka Indonesia pada akhir abad ke-20 tidak luput dari gejala "Peledakan Penduduk" (*Population explosion*). Cepatnya perkembangan penduduk disamping disebabkan oleh tingginya tingkat kelahiran, juga disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian.

2. Penyebaran penduduk yang tidak merata

Kenyataan menunjukkan bahwa penyebaran penduduk tidak seimbang antara daerah (pulau) yang satu dengan daerah (pulau) yang lain. Keadaan ini menimbulkan perbedaan yang besar pada tingkat kepadatan penduduk antara berbagai daerah.

3. Komposisi penduduk menurut usia dan kelamin

Ditinjau dari segi komposisi usia, maka tingkat fertilitas yang tinggi membawa akibat yang cukup gawat. Banyaknya penduduk pada kelompok usia tidak produktif sangat besar artinya bagi kehidupan masyarakat. Penduduk yang produktif adalah dari golongan usia kerja (15 - 64 tahun). Besarnya perbandingan antara penduduk usia produktif dan penduduk belum/tidak produktif akan menunjukkan angka beban ketergantungan. Begitu juga dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Apabila komposisi penduduk wanita lebih tinggi dari penduduk laki-laki maka menunjukkan suatu potensi perkembangan penduduk yang tinggi.

4. Arus urbanisasi yang tinggi

Terjadinya urbanisasi disebabkan oleh banyak hal, salah satu di antaranya adalah keinginan di kalangan orang-orang di daerah pedesaan untuk mengadu nasib dan mengejar kemungkinan kehidupan yang lebih baik di kota-kota besar. Merosotnya tingkat hidup akibat relatif tingginya tingkat kelahiran di daerah pedesaan terutama disebabkan oleh menurunnya luas tanah garapan per kapita (*land-man ratio*) di sektor pertanian. Ini merupakan salah satu pendorong yang menyebabkan sebagian penduduk daerah pedesaan pindah ke kota-kota besar guna mengejar kehidupan yang lebih baik. Adanya arus perpindahan ini menyebabkan cepatnya perkembangan penduduk di daerah perkotaan. Cepatnya perkembangan penduduk di daerah perkotaan selain disebabkan oleh urbanisasi, juga disebabkan tingginya penambahan alami penduduk daerah perkotaan itu sendiri.

Perkembangan penduduk yang cepat mempunyai implikasi pada berbagai bidang seperti tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan dan lain-

lain. Bertambahnya penduduk dengan cepat mengakibatkan tekanan pada sektor penyediaan fasilitas pada masing-masing bidang tersebut, baik kuantitatif maupun kualitatif. Mengingat kemampuan masyarakat yang masih sangat terbatas terutama di segi sumber-sumber pembiayaan, maka perlu diadakan Keluarga Berencana guna memperlambat laju perkembangan penduduk ini (Elfindri, 2004)

Dengan berhasilnya Keluarga Berencana memperlambat laju perkembangan penduduk, maka biaya-biaya yang sedianya diperuntukkan penyediaan fasilitas guna mengejar kebutuhan masyarakat yang meningkat akibat cepatnya perkembangan penduduk itu, dapat di-realokasikan untuk kepentingan-kepentingan lainnya atau untuk menaikkan kualitas dari pada fasilitas-fasilitas tersebut. Perbaikan dalam bidang-bidang tersebut secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama bidang pendidikan dan kesehatan, merupakan *human investment* yang kelak akan menghasilkan generasi pembangunan yang berkualitas tinggi baik fisik maupun mental spiritual.

Penduduk merupakan sumber tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi (*input*). Dampak positif dari pertumbuhan penduduk ini adalah menunjukkan peningkatan pasokan tenaga kerja dan permintaan barang dan jasa. Faktor demografi merupakan suatu penyebab meningkatnya pengangguran. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi secara otomatis akan menambah jumlah angkatan kerja. Hal ini jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja baru maka akan berdampak pada naiknya pengangguran.. Sebab jumlah penduduk berhubungan positif dengan jumlah angkatan kerja.

Menurut Maltus (dikutip dalam Lincolin Arsyad, 1997) kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit diatas tingkat subsisten.

Menurut Maier (dikutip dari Kuncoro, 1997) dikalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap suplai bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumber daya manusia.

Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumber daya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam "kualitas manusia" semakin sulit.
2. Banyak negara dimana penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumber daya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena pertumbuhan

penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya.

3. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat.

2.1.2 Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja menurut UU No.13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengertian tenaga kerja menurut Depnakertrans adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (UU Pokok Ketenagakerjaan No, 14 Tahun 1969). Dalam hubungan ini maka pembinaan kemampuan efektifitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan.

Pengertian bekerja menurut indikator ketenagakerjaan (2003) adalah :

“Jika telah melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit satu jam secara tidak terputus selama satu minggu yang lalu. kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi”.

Defenisi orang bekerja dengan tidak bekerja sangat longgar sehingga penentuan batas antara orang yang bekerja dengan pengangguran sangat tipis. Perbedaan defenisi ini juga berbeda antara Negara satu dengan Negara yang lain, tergantung keadaan Negara tersebut, terutama dalam penentuan berapa jam seseorang dapat digolongkan menjadi kelompok yang telah bekerja.

BPS membagi tenaga kerja atas 3 macam yaitu :

- 1) Tenaga kerja penuh (full employed), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja besar atau sama dengan 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas.
- 2) Tenaga kerja tidak penuh (under employed), atau setengah pengangguran, adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam dalam seminggu.
- 3) Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja, adalah tenaga kerja dengan jam kerja $0 \geq 1$ jam per minggu

Secara praktis pengertian tenaga kerja atau bukan tenaga kerja atau bukan tenaga kerja hanya dibataskan oleh batasan umur. Tiap-tiap negara mempunyai batasan umum tertentu bagi setiap tenaga kerja, namun di Indonesia tidak menganut batas umur maksimal karena Indonesia belum memiliki jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang memiliki tunjangan di hari tua yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta. Untuk golongan inipun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu mereka yang telah mencapai usaha pensiun biasanya tetap masih harus bekerja sehingga mereka tetap digolongkan sebagai tenaga kerja (Payaman Simanjuntak didalam Wicaksono, 1985).

Tenaga kerja (*manpower*) dipilah kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan; yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan tetapi bukan imbalan langsung atas jasa kerjanya, seperti pensiunan (Dumairy, 1996).

Menurut Elfindri dan Bachtiar (2004) dalam bukunya “Ekonomi Ketenagakerjaan” menyebutkan bahwa konsep ketenagakerjaan yang lazim digunakan pada statistik ketenagakerjaan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Penduduk Usia Kerja (UK). Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang diakui sebagai batas awal dari usia kerja. Penerapan penduduk usia kerja diatas 15 tahun adalah setelah ILO yang menginstruksikan agar batas awal usia kerja adalah setelah 15 tahun. Sedangkan pada statistik Indonesia semenjak tahun 1971 batas usia kerja adalah bilamana seseorang sudah berumur 10 tahun atau lebih.
2. Angkatan Kerja (AK). Adalah penduduk yang kegiatan utamanya selama seminggu yang lalu bekerja (K), atau sedang mencari pekerjaan (MP). Mencari pekerjaan adalah seseorang yang kegiatan utamanya sedang mencari pekerjaan, atau sementara sedang mencari pekerjaan, atau sementara sedang mencari pekerjaan dan belum bekerja minimal 1 jam selama seminggu yang lalu. Jadi Angkatan kerja dapat diformulasikan dengan :

$$AK = K + MP$$

Ket : AK = Angkatan kerja

K = Bekerja

MP = Sedang mencari pekerjaan

3. Bukan Angkatan Kerja (BAK) adalah mereka yang berusia kerja (15 tahun ke atas) namun kegiatan utama selama seminggu yang lalu adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Mereka yang tercatat lainnya jumlahnya sedikit, mereka mungkin sebagian besar masuk ke dalam transisi antara sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau bukan kategori Bukan Angkatan Kerja. Jadi Jumlah Usia Kerja dilihat kedalam persamaan sebagai berikut :

$$UK = AK + BAK$$

Ket : UK = Usia Kerja

AK = Angkatan Kerja

BAK = Bukan Angkatan Kerja

4. Partisipasi Angkatan Kerja. Angka partisipasi angkatan kerja menunjukkan persentase besarnya jumlah penduduk usia kerja yang memasuki pasar kerja "labor market". Dalam menganalisis persentase tersebut sering diistilahkan menjadi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk menghitung TPAK dapat digunakan rumusan sebagai berikut :

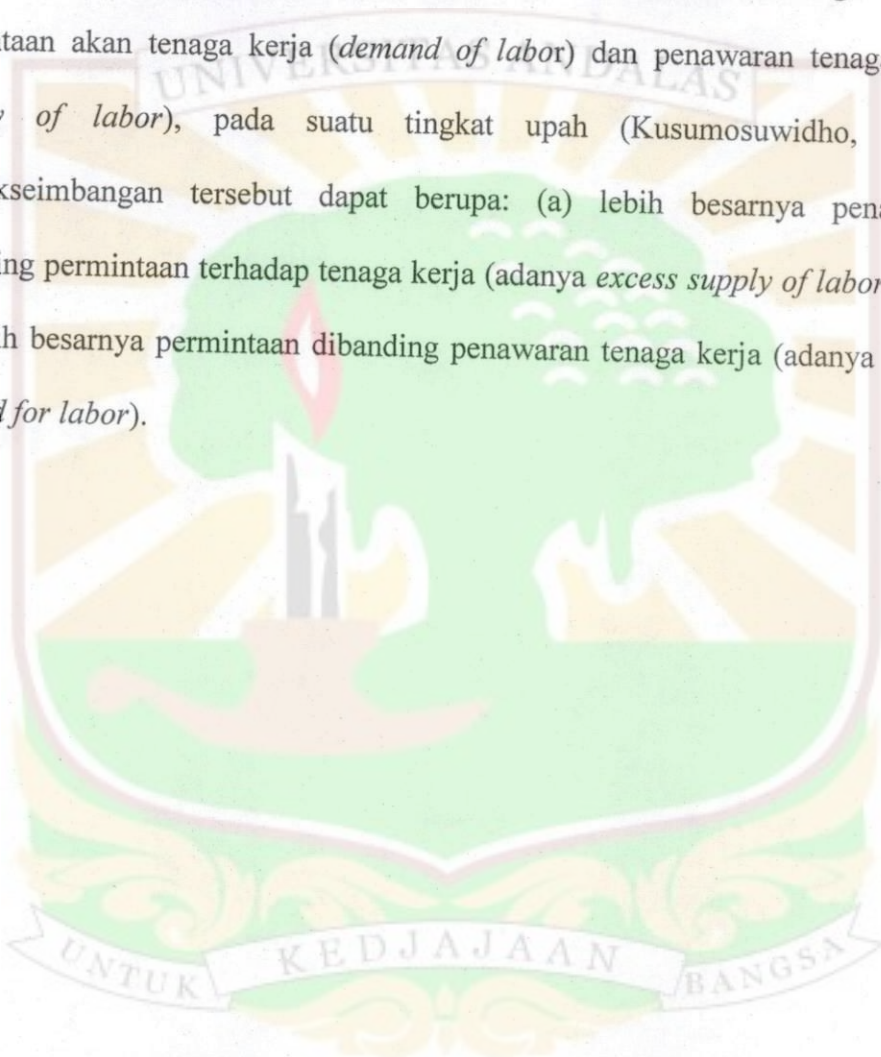
$$TPAK = AK / UK \times 100 \%$$

5. Tingkat Pengangguran (TP). Tingkat pengangguran menunjukkan persentase besarnya angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dari seluruh angkatan

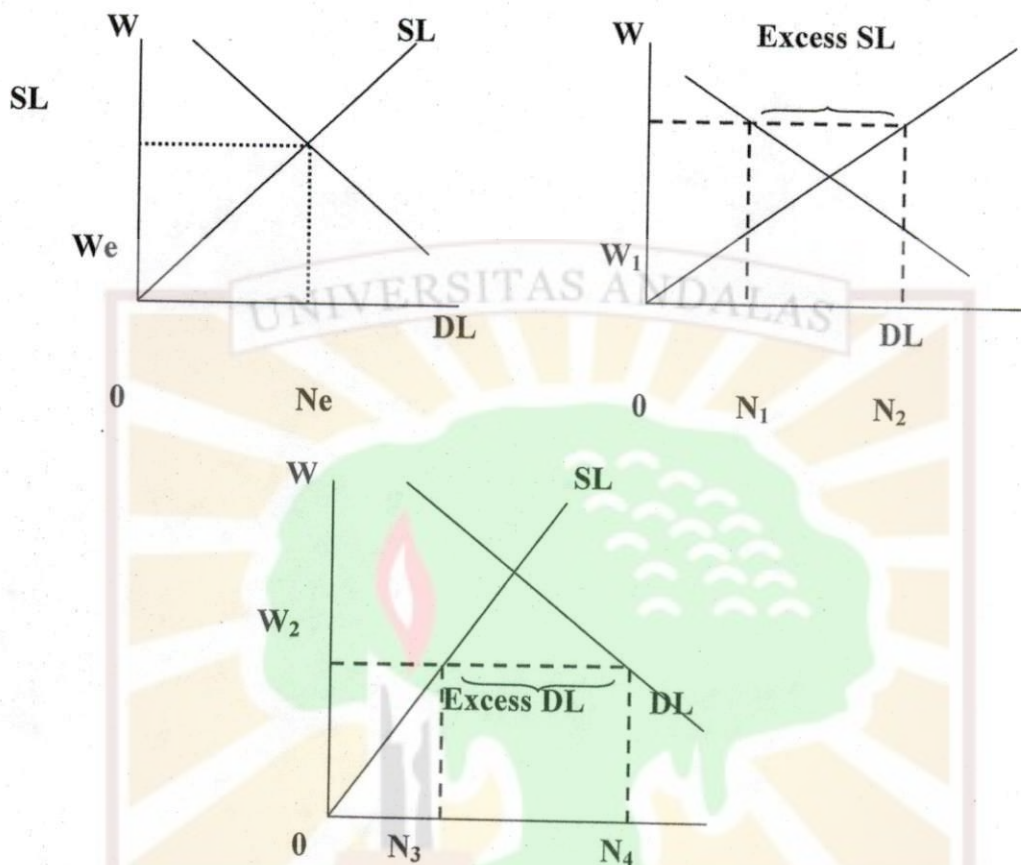
kerja yang ada. TP sering juga disebut sebagai tingkat pengangguran terbuka (*open unemployment*). Rumus Tingkat Pengangguran adalah sebagai berikut :

$$TP = MP / AK \times 100 \%$$

Sementara itu Mulyadi (2003) menyatakan bahwa Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja (*demand of labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labor*), pada suatu tingkat upah (Kusumosuwidho, 1981). Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa: (a) lebih besarnya penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (adanya *excess supply of labor*) dan, (b) lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya *excess demand for labor*).



Gambar 2.1
Ketidakseimbangan Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja



Sumber : Mulyadi (2003)

Keterangan :

SL = Penawaran tenaga kerja

DL = Permintaan tenaga kerja

W = Upah riil

N = Jumlah tenaga kerja

Penjelasan gambar:

- (1) Jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, yaitu masing - masing sebesar N_e pada tingkat upah keseimbangan W_e . Titik keseimbangan dengan demikian adalah titik E. Di sini tidak ada *excess supply of labor* maupun *excess demand for labor*. Pada tingkat upah keseimbangan W_e maka semua orang yang ingin bekerja telah dapat bekerja. Berarti tidak ada orang yang menganggur. Secara ideal keadaan ini disebut *full employment* pada tingkat upah W_e tersebut.
- (2) Pada gambar kedua terlihat adanya *excess supply of labor*. Pada tingkat upah W_1 penawaran tenaga kerja (SL) lebih besar daripada permintaan tenaga kerja (DL). Jumlah tenaga kerja yang menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebanyak N_2 sedangkan yang diminta hanya N_1 . Dengan demikian ada orang yang menganggur pada tingkat upah W_1 ini sebanyak $N_2 - N_1$.
- (3) Pada gambar ketiga terlihat adanya *excess demand for labor*. Pada tingkat upah W_2 permintaan akan tenaga kerja (DL) lebih besar daripada penawaran tenaga kerja (SL). Jumlah orang yang menawarkan dirinya, untuk bekerja pada tingkat upah W_2 adalah sebanyak N_3 orang, sedangkan yang diminta adalah sebanyak N_4 orang.

Ada dua teori penting perlu dikemukakan dalam kaitanya dengan masalah ketenagakerjaan. Pertama adalah teori Lewis (1959) yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan

pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain.

Teori kedua adalah Teori Fei- Ranis (1961) yang berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri – ciri sebagai berikut: kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Gambar 2.2

Skema pengelompokan penduduk



Pemilahan penduduk berdasarkan pendekatan angkatan kerja (Dumairy, 1996)

2.1.3 Ketenagakerjaan

Sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja sangat penting dalam menunjang proses produksi. Jumlah yang tepat serta kualitas yang baik dapat meningkatkan jumlah produksi (Zeni, 2006). Namun, masalah ketenagakerjaan di Indonesia sangat luas dan kompleks. Luas karena menyangkut jutaan jiwa, kompleks karena masalahnya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami (Depnakertrans, 2006).

Masalah-masalah ketenagakerjaan bersifat multidimensi, sehingga penyelesaiannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan yang multidimensi pula. Setiap upaya pembangunan kemudian selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Melalui kebijakan, pihak pengusaha diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan internal melalui penyelesaian tingkat upah, bukan melalui pemutusan hubungan kerja yang berdampak sangat luas. Kebijakan semacam itu diharapkan dapat mempersempit tingkat kesenjangan upah antara lapangan usaha formal dan sektor informal, menekan laju kenaikan pengangguran terbuka, serta menurunkan angka kemiskinan.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mencerminkan keberhasilan pembangunan adalah perluasan kesempatan kerja bagi penduduk. Semakin besar kesempatan kerja yang dapat diraih oleh penduduk dalam suatu wilayah, semakin tinggi pula standar hidup penduduk dalam wilayah tersebut. Di sisi lain, jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja

produktif, dan ini merupakan salah satu faktor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi (Todaro dan Smith, 2004).

2.1.4 Indikator Kesempatan Kerja

Adapun indikator dari kesempatan kerja adalah sebagai berikut.

1) Laju pertumbuhan investasi

Menurut Tambunan (2001) investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (sustainable development), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat yang selanjutnya dapat menciptakan serta meningkatkan permintaan di pasar. Pendapat tersebut menjelaskan tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh investasi, dimana munculnya investasi akan mendorong kesempatan kerja dan peningkatan terhadap pendapatan.

2) Laju pertumbuhan penduduk

Banyaknya peluang atau kesempatan kerja yang terisi dapat tercermin dari besarnya jumlah penduduk yang bekerja, sehingga dengan demikian laju pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dikatakan dapat menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi.

3) Angkatan Kerja (labor force)

Merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Kebutuhan akan tenaga kerja didasarkan pada pemikiran bahwa tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara

keseluruhan, dimana tenaga kerja yang berpotensi tersebut akan digunakan dalam menentukan proses pembangunan ekonomi.

Sedangkan menurut Sadono (2003) faktor yang mempengaruhi besarnya kesempatan kerja adalah besarnya permintaan agregat. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat, Jadi besarnya jumlah kesempatan kerja tergantung dari besarnya permintaan total/agregat. Permintaan agregat terdiri dari konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor netto. Persamaan permintaan tenaga kerja dalam penelitian Cappellin (2003) merupakan turunan dari model struktur yaitu :

$$D = f(C)$$

$$X = f(D)$$

$$E = f(X, W)$$

Dimana :

D = Permintaan akhir barang dan jasa

C = Konsumsi masyarakat

X = Output

W = Upah

Menurut Payaman, jumlah orang yang bekerja tergantung pada besarnya permintaan atau demand dalam masyarakat. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi suatu negara dan tingkat upah. Menurut Tambunan (2003) besarnya kesempatan kerja bergantung pada banyak faktor. Diantaranya pertumbuhan output, upah dan harga-harga dari faktor produksi lain. Berdasarkan penelitian Rumbiak, faktor yang dapat menyebabkan penambahan kesempatan

kerja adalah penambahan pengeluaran konsumsi pemerintah dan perbaikan ekonomi yang menimbulkan investasi.

2.1.5 Konsep Investasi

Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Kegiatan investasi dalam suatu perekonomian dapat mendorong naik turunnya tingkat perekonomian negara yang bersangkutan karena mampu meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan dan pemerintah secara keseluruhan untuk membeli barang-barang modal riil baik untuk mendirikan perusahaan baru maupun untuk memperluas usaha yang telah ada dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada biaya modal yang dikeluarkan untuk melakukan investasi. Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2001).

Secara garis besar investasi dapat digolongkan menjadi tiga (Sukirno, 2001) yaitu antara lain.

- 1) Autonomous investment, yaitu investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, misalnya investasi pada rehabilitasi prasarana jalan dan irigasi. Investasi jenis ini biasanya lebih banyak dilakukan oleh sector pemerintah, karena investasi ini akan menyangkut banyak aspek social budaya yang ada di masyarakat.

2) Induced investment, yaitu macam investasi yang mempunyai kaitan dengan tingkat pendapatan, misalnya adanya kenaikan pendapatan yang ada pada masyarakat di suatu tempat atau negara menyebabkan kenaikan kebutuhan barang tertentu. Kenaikan atau pertambahan permintaan terhadap barang sudah tentu akan mendorong untuk melakukan investasi.

3) Investasi yang sifatnya dipengaruhi oleh adanya kenaikan tingkat bunga uang atas modal yang berlaku di masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah investasi (Deliarnov, 1995) yaitu antara lain sebagai berikut.

a) Inovasi dan Teknologi

Adanya temuan-temuan baru menyebabkan cara-cara berproduksi lama menjadi tidak efisien. Untuk itu perusahaan-perusahaan perlu menemukan investasi untuk membeli peralatan mesin-mesin yang canggih.

b) Tingkat Perekonomian

Makin banyak aktivitas perekonomian makin besar pendapatan nasional dan makin banyak bagian pendapatan yang dapat ditabung, yang pada gilirannya akan diinvestasikan pada suatu usaha yang menguntungkan.

c) Tingkat Keuntungan Perusahaan

Makin besar tingkat keuntungan perusahaan, maka makin banyak bagian laba yang dapat ditahan dan dapat digunakan untuk tujuan investasi.

d) Situasi Politik

Jika situasi politik aman dan pemerintah banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan, maka tingkat investasi akan tinggi.

Salah satu kegiatan investasi yang dapat diketahui adalah penanaman modal, penanaman modal dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Untuk investasi swasta di Indonesia yang dilakukan dengan kemudahan fasilitas berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang dimaksud dengan "Modal Dalam Negeri" adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki negara, swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan suatu usaha, sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, pada Pasal 1 menyebutkan bahwa: "Pengertian penanaman modal dalam Undang-undang ini hanya penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, yang digunakan untuk menjalankan perusahaan Indonesia, dalam arti pemilik modal tersebut". Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga seperti saham dan obligasi. Investasi langsung yang dikenal dengan penanaman modal asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Dibanding dengan investasi portofolio, penanam modal asing lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang permanen/jangka

panjang, penanam modal asing memberi andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru.

Penanaman modal pada hakekatnya merupakan kegiatan investasi yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Untuk investasi swasta di Indonesia yang dilakukan dengan kemudahan fasilitas berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Menurut UU No. 1 Tahun 1967, PMA adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini yang digunakan untuk menjalankan perusahaan Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut, perluasan dan alih status, yang terdiri dari saham peserta Indonesia, saham asing dan modal pinjaman.

Pengertian PMDN menurut UU No. 6 Tahun 1968 ialah bagian dari pada kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara, swasta nasional maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan dan disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1967, tentang PMA.

2.1.6 Upah Minimum Regional

Upah minimum sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral. Dalam hal ini upah minimum adalah upah pokok dan

tunjangan. Upah Pokok Minimum adalah upah pokok yang diatur secara minimal baik regional, sektoral maupun sub sektoral.

Disamping definisi tersebut diatas maka DPP FPSI (Position Paper, Agustus 1983) dalam Sumarsono (2003) menetapkan definisi upah minimum sebagai upah permulaan yang diterima oleh seorang pekerja atau buruh yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara minimal.

Sehubungan dengan adanya otonomi daerah, maka penetapan upah minimu dilakukan oleh pemerintah daerah. Dasar hukum pelimpahan wewenang penetapan upah minimum dilakukan dengan merubah beberapa pasal dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.1 tahun 1999. Tentang upah minimum dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.226 tahun 2000. Perubahan tersebut mempertegas kewenangan penetapan upah minimum oleh Gubernur dan sebagai pedoman dalam menetapkan upah minimum.

Dasar-dasar penentuan upah telah diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.17/2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak. Penentuan UM diawali dengan penentuan standar hidup layak oleh dewan pengupahan, dewan tersebut beranggotakan Perwakilan pemerintah, pengusaha, buruh serta para akademisi.

Jumlah upah yang diberikan perusahaan kepada buruhnya didasarkan pada standar upah minimum yang didasarkan kepada standar upah minimum yang didasarkan kepada penghitungan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) paling rendah (minimum). KHL artinya perhitungan harga bahan-bahan keperluan hidup

yang mutlak diperlukan untuk mempertahankan buruh sebagai seorang buruh didalam hidupnya.

Agar dapat sesuai dengan kondisi actual, besarnya upah minimum regional diadakan peninjauan selambat-lambatnya dua tahun sekali dan dituangkan dalam sebuah keputusan hukum yang dapat mengikat pihak-pihak terkait untuk berkewajiban menjalankannya. Menurut peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi 1999 upah minimum baik UMR Tk I, Tk II dan upah minimum sector regional I, dan tingkat II ditetapkan oleh menteri. Namun sejak penetapan kebijakan otonomi daerah dan sesuai dengan Kepmenakertrans 226 tentang perubahan pasal permenaker No 1999, besaran Upah minimum ditetapkan masing-masing dalam lingkup propinsi melalui keputusan Gubernur berupa Upah Minimum Propinsi (UMP), Upah Minimum Sector Propinsi, Upah Minimum Kabupaten dan kota, dan Upah Minimum Sektor Kabupaten dan Kota.

2.1.7 UU Ketenagakerjaan

Salah satu dari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah adalah kebijakan perekonomian dari daerah itu sendiri salah satunya adalah dalam bentuk Undang-Undang (UU). pada tahun 2003 Presiden Indonesia bersama DPR menerbitkan UU No 13 yang mengatur masalah ketenagakerjaan di Indonesia, di dalam Undang Undang ini diatur hal hal mengenai Pelatihan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Kerja, Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan, Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja, dan Pengawasan Ketenagakerjaan. UU ini dibuat untuk mengatasi berbagai macam

masalah ketenagakerjaan yang banyak muncul setelah krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998.

2.2 Study Literatur

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi dasar yang kuat dalam penyajian materi, baik dari segi pemilihan variabel maupun konsep yang umumnya dipakai.

1) Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ari Gunawan (2006), dalam penelitian berjudul “Pengaruh Produksi Total dan Investasi Terhadap Kesempatan Tenaga Kerja di Provinsi Bali periode tahun 1985-2004”. Penelitian ini menggunakan analisis Regresi berganda dan koefisien korelasi berganda. Dalam perhitungan dengan program SPSS diperoleh persamaan regresi yaitu : $Y = 807370.1 + 1.129 X_1 + 7.750 X_2 + u_i$. Dalam perhitungan didapatkan bahwa berarti ada hubungan positif antara produksi total dengan penyerapan tenaga kerja. Selain itu juga didapatkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat investasi dengan penyerapan tenaga kerja. Hasil perhitungan untuk Uji partial diperoleh hasil $F\text{-tabel } (3,49) \leq F\text{-hitung } (107,024)$ yang berarti produksi total dan investasi berpengaruh secara partial terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan sekarang ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Gunawan adalah kedua penelitian ini sama-sama menggunakan kesempatan kerja sebagai variabel dependent, menggunakan alat analisis yang sama yaitu uji regresi dan korelasi menggunakan software SPSS.

2) Hari Sadyana (2008) meneliti tentang “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Swasta dan Ekspor Terhadap Kesempatan Kerja Provinsi Bali Tahun 1993-2006”. Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Bali, variabel yang digunakan meliputi pertumbuhan ekonomi, investasi swasta dan ekspor terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali tahun 1993-2006. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji ada tidaknya pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi swasta dan ekspor terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali tahun 1993-2006. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi swasta dan ekspor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali tahun 1993-2006 yaitu sebesar 75,6 persen dan 24,4 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model.

3) Pramitha Purwanti (2009) meneliti tentang “Analisis Kesempatan Kerja Sektoral di Kabupaten Bangli dengan Pendekatan Pertumbuhan Berbasis Ekspor”. Sasaran dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis kesempatan kerja sektor ekonomi dengan potensi tumbuh penuh yang akan terus diperluas untuk pengembangan ekonomi Kabupaten Bangli. Hasil kesimpulan yang didapat adalah Kesempatan kerja nyata di Kabupaten Bangli dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan kesempatan kerja di Provinsi Bali dan keunggulan kompetitif, yang berarti kedua komponen tersebut akan menambah kesempatan kerja yang terjadi di Kabupaten Bangli, namun tidak dengan komponen bauran industri. Komponen bauran industri mempengaruhi kesempatan kerja di Kabupaten Bangli secara negatif, yang berarti komponen ini menyebabkan laju kesempatan kerja mengalami kontraksi.

4) Bambang Setiaji dan Sudarsono (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Diferensiasi Upah Antar Provinsi Terhadap Kesempatan Kerja”. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji diferensiasi upah (harga tenaga kerja) dan pengaruhnya terhadap permintaan kerja antar industri dan antar propinsi di Indonesia. Sebagaimana dilaporkan dalam penelitian tahap pertama, beberapa propinsi pada tahun 2002 masih menetapkan upah minimum sektoral propinsi atau UMSP. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ternyata propinsi-propinsi yang melakukan diferensiasi upah atau menetapkan upah minimum sektoral mempunyai signifikan yang beragam, misalnya, di atas lima jenis upah, cenderung mendiferensiasi keatas Diferensiasi upah ke atas tersebut cenderung mengurangi penggunaan tenaga kerja. Kesempatan kerja rata-rata propinsi dengan UMSP yang makin terdiferensiasi, makin berkurang dengan besaran yang signifikan

5) Priyo Prasajo (2009) meneliti tentang “Analisa Pengaruh Investasi PMA dan PMDN, Kesempatan Kerja, Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2006”. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, kesempatan kerja, pengeluaran pemerintah terhadap produk domestik regional bruto di Jawa Tengah periode tahun 1980-2006.

6) David Brady, Yunus Kaya dan Gary Gereffi (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Stagnating Industrial Employment in Latin America”. Dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan bahwa industrialisasi negara-negara berkembang memiliki fundamental mengubah pekerjaan, lapangan kerja, dan tenaga kerja bagi jutaan orang. Meskipun industrialisasi dunia sebagian besar

berkembang, dapat disajikan bukti bahwa Amerika Latin telah mengalami stagnansi kerja industri dalam beberapa dekade terakhir. Manfaat dari data baru yang tersedia pada industri kerja sebagai persentase dari total pekerjaan dari tahun 1980 hingga 2006, menganalisis model fixed-efek untuk 20 negara Amerika Latin. Secara khusus, diteliti tiga penjelasan teoritis: produktivitas/keuntungan komparatif, institusionalisme, dan ketergantungan kepada sistem dunia. Hasil Analisis menunjukkan bahwa produktivitas berlaku keunggulan komparatif memiliki keterbatasan nilai. Sebaliknya, ditemukan bukti yang mendukung untuk kombinasi kelembagaan dan ketergantungan sistem dunia adalah variabel. Secara khusus, stagnansi pangsa lapangan kerja sektor industri di negara Amerika Latin telah didorong oleh efek negatif (dalam urutan besarnya) perjanjian perdagangan Mercosur, mineral dan ekspor bijih (sebagai persentase dari total ekspor), durasi politik saat ini rezim belanja, militer (sebagai persentase dari PDB), dan ke dalam arus investasi asing langsung (sebagai persentase dari PDB). Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang kesempatan kerja, sedangkan perbedaannya adalah pada tempat dan waktu yang digunakan.

2.3 Hipotesis

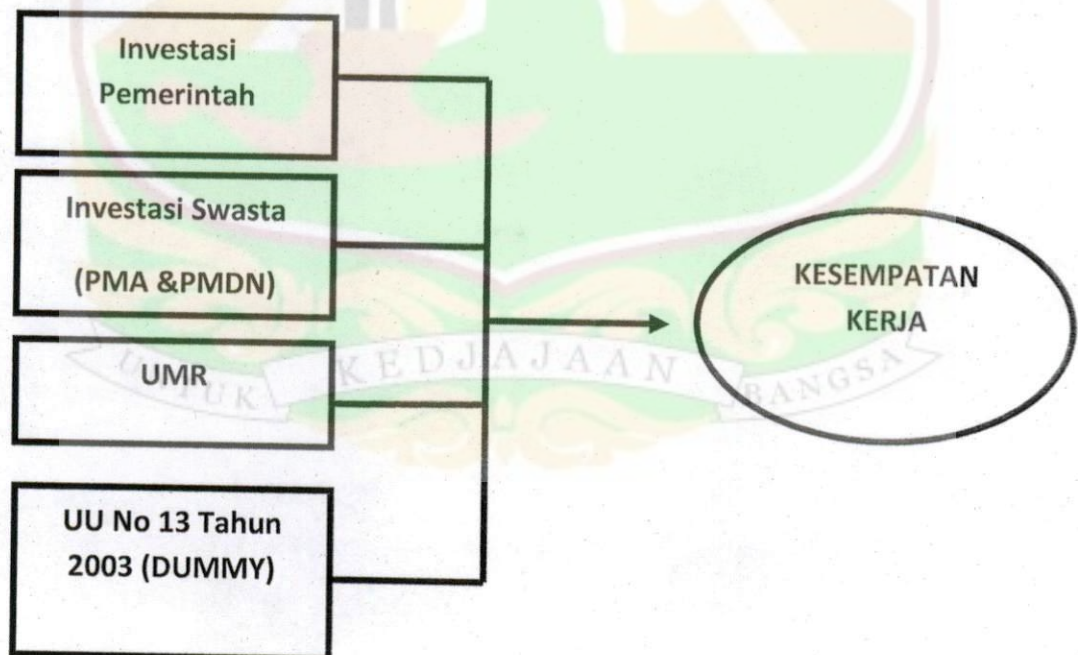
1. Diduga adanya hubungan positif dan signifikan antara PMA dan PMDN terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat selama tahun 1996-2010

2. Diduga adanya hubungan yang positif antara dikeluarkannya kebijakan ketenagakerjaan pada tahun 2003 yakni UU No 13 Tahun 2003 dengan kesempatan kerja di Sumatera Barat
3. Diduga adanya hubungan yang negatif antara perkembangan upah minimum regional dengan kesempatan kerja di Sumatera Barat selama periode 1996-2010

2.4 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah dalam memahami dan melaksanakan penelitian ini, maka perlu dibuat semacam kerangka pemikiran, kerangka pemikiran skripsi ini dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini.

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi pada perpustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca, menyalin serta mengolah data-data atau catatan-catatan yang tertulis di instansi terkait yaitu, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Data yang diperoleh adalah data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yakni data mengenai investasi pemerintah, investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi, serta kesempatan kerja Provinsi Sumatera Barat tahun 1996-2010.

3.2 Identifikasi Variabel

Pada dasarnya ada dua jenis variabel yang penulis pergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- 1) Variabel terikat, merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variasi yang dialami oleh variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah kesempatan kerja Provinsi Sumatera Barat dari tahun 1996-2010
- 2) Variabel bebas, merupakan variabel yang akan mempengaruhi nilai variabel terikat dari variasi atau perubahan yang dialami variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah investasi pemerintah dan investasi swasta, serta UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

3.3 Metode Analisa dan Pembentukan Model

3.3.1 Analisis Deskriptif dan Induktif

Analisis deskriptif yaitu teknik yang digunakan untuk menggambarkan suatu hal secara umum dan bertujuan untuk mempermudah penjelasan melalui tabel-tabel dan grafik. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan situasi ketenagakerjaan secara umum meliputi jumlah angkatan kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran.

3.3.2 Analisis Regresi Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel Investasi pemerintah dan Investasi swasta serta pertumbuhan ekonomi dan UU No 13 Tahun 2003 terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat pada tahun 1996-2010 maka digunakan teknik analisis Regresi Linear Berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut.

$$KK = f(IP_{t-1}, PMA_{t-1}, PMDN_{t-1}, UMR, UUd, e) \quad (1)$$

KK = Kesempatan Kerja

IP_{t-1} = Investasi Pemerintah

PMA_{t-1} = Penanaman Modal Asing

PMDN_{t-1} = Penanaman modal dalam negeri t-1

UU = UU No 13 tahun 2003

UMR = Upah minimum regional

e = Variable Penganggu

Data regresi yang memiliki nilai cukup besar membuat hasil regresi dalam jumlah besar pula, untuk itu persamaan (3) diatas dijadikan kedalam bentuk *Log* sehingga hasil regresi lebih kecil dan lebih signifikan, yaitu menjadi :

$$\text{Log } KK = b_0 + b_1 \text{Log } IP_{t-1} + b_2 \text{Log } PMA_{t-1} + b_3 \text{Log } PMDN + b_4 \text{Log } UMR + b_5 \text{Log } Ud + e \quad (2)$$

Dimana :

b_0 = konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 = koefisien regresi yang akan ditaksir nilainya

Sebelum menguji dan menganalisa data dengan bantuan software SPSS (*Statistical Product And Service Solution*) menurut Gujarati (1999), perlu dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinearitas dan heterokedastisitas. Uji asumsi klasik ini digunakan agar dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bisa jika telah memenuhi syarat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) yakni tidak terdapat multikolinearitas dan heterokedastisitas, dengan menggunakan hasil analisis komputer dari program SPSS 16.0 maka dapat digunakan untuk menguji model ada tidaknya multikolinearitas dan heterokedastisitas.

1). Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance (TOL) dan variance inflation factor (VIF). Apabila tolerance value lebih tinggi dari 0,10 atau VIF lebih kecil dari 10 maka disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas. Rumus untuk mengetahui ada

tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi dapat dilakukan dengan melihat TOL dan VIF yaitu kecepatan peningkatan daripada varian dan koverian yang didefinisikan sebagai berikut.

$$VIF = \frac{1}{1 - R_i^2} \quad (3)$$

Keterangan :

VIF_i = Varian Inflation Factor variabel ke-i

R_i² = Korelasi variabel ke-i

Sedangkan Tolerance (TOL) merupakan kebalikan dari VIF yaitu :

$$TOL_i = \frac{1}{VIF_i} = (1 - R_i^2) \quad (4)$$

Keterangan :

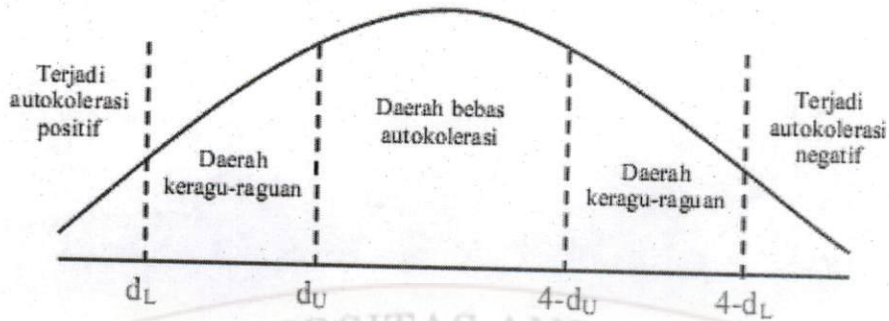
TOL_i = Tolerance variabel ke-i

2) Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara variabel gangguan satu dengan variabel gangguan lainnya. Akibat adanya autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dan variasinya tidak minimum, sehingga tidak efisien. Rumus untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, dapat digunakan uji Durbin Watson statistik. Mekanisme uji Durbin Watson adalah sebagai berikut.

$$d = \frac{\sum (u_t - u_{t-1})^2}{\sum u_t^2} \quad (5)$$

Gambar 3.1 Daerah Pengujian Autokolerasi dengan Uji Durbin Watson



3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yang meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Jika tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (nilai absolut residual), maka tidak ada heteroskedastisitas.

3.4 Uji Statistik

Untuk mengetahui kebenaran hipotesa, maka perlu uji statistik berupa Koefisien Determinasi R^2 (*Goodness Of Fit*), uji F, dan uji t.

a. Koefisien Determinasi R^2 (*Goodness Of Fit*)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat berapa besarnya sumbangan variable independen terhadap pembentukan variable dependen. Semakin tinggi R^2 akan semakin baik bagi model regresi, karena variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat lebih besar. Bila nilai R^2 mendekati 0 berarti

sedikit sekali variasi variabel dependent yang dijelaskan oleh variabel independent. Jika nilai R^2 bergerak mendekati 1, berarti semakin besar presentase variasi variabel dependent yang dijelaskan oleh variabel independent. Jika dalam perhitungan $R^2 = 0$ maka hal ini menunjukkan variasi variabel dependent tidak bisa dijelaskan oleh variabel independent (Gudjarati, 1999).

Rumus yang dipakai adalah:

$$R^2 = \frac{a_1 \sum X_1 Y + a_2 \sum X_2 Y}{\sum Y^2} \quad (6)$$

Dimana nilai R^2 tersebut berkisar antara 0 dan 1 bila nilai R^2 sama dengan satu berarti proporsi atau persentase pengaruh X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 terhadap variable atau perubahan Y adalah 100%. Artinya seluruh perubahan Y disebabkan oleh semua variable tersebut tidak ada faktor lain yang mempengaruhi nilai Y . Jika mendekati nilai satu maka makin dekat hubungan antara Y dengan X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 .

b. Uji F-test Statistik

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut :

- $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Nilai F-tabel dapat dicari dengan degrees of freedom : F-tabel : $F \alpha : n-k : k-2$.

Dimana :

- α = Derajat signifikan
- n = Jumlah sampel (observasi)
- k = Banyaknya parameter/koeffisien regresi plus konstanta
- F-hitung diperoleh dengan rumus : (Nachrowi, 2006)

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)} \quad (7)$$

Dimana :

- R^2 = Koefisien determinasi
- n = Jumlah sampel (observasi)
- k = Banyaknya parameter/koeffisien regresi plus konstanta
- Kriteria pengujian :
 - Jika F-hitung < F-tabel, maka H_0 diterima Berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
 - Jika F-hitung > F-tabel, maka H_0 ditolak Berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji t-test Statistik

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual dan untuk mengetahui dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain konstan atau tetap Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut :

- $H_0 : \beta_i = 0$, artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

- $H_a : \beta_i \neq 0$, artinya variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Nilai t-tabel dapat dicari dengan degrees of freedom :

$$t\text{-tabel} = t_{\alpha : n-k}$$

Dimana :

α = Derajat signifikan

n = Jumlah sampel (observasi)

k = Banyaknya parameter/koeffisien regresi plus konstanta

- t-hitung dapat dicari dengan rumus : (Nachrowi, 2006)

$$t = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

(8)

Dimana :

β_i = Koeffisien Regresi

$Se(\beta_i)$ = Standar Error Koeffisien Regresi

- Kriteria pengujian :
 - Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima Berarti variabel independen tersebut secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
 - Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak Berarti variabel independen tersebut secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Pengertian dan batasan-batasan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Kesempatan Kerja (Y)

Jumlah total kesempatan kerja Provinsi Sumatera Barat, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh penduduk Provinsi Sumatera Barat yang sudah memasuki pasar kerja atau dengan kata lain penduduk yang sudah bekerja pada periode tahun 1995-2010, yang ditentukan dalam satuan orang.

2) Investasi Pemerintah (X_1)

Pembentukan Modal bruto yang dilakukan oleh pemerintah dan perubahan stok (Investasi ICOR Sumatera Barat) yang mencakup pengadaan, pembuatan atau pembelian barang modal baru yang dipakai untuk satu tahun atau lebih seperti bangunan atau mesin alat angkutan dan lain-lain. Investasi pemerintah pemerintah ini menggunakan satuan rupiah

3) Investasi Swasta/ PMA dan PMDN (X_2, X_3)

Investasi swasta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan nilai realisasi investasi swasta yang memperoleh fasilitas dari pemerintah berupa PMA dan PMDN yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 1996-2010 dalam jutaan rupiah.

4) UMR (X_4)

Merupakan nilai upah paling minimum yang ditetapkan pemerintah Sumatera Barat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ataupun lembaga yang menggunakan jasa tenaga kerja. UMR didalam penelitian ini menggunakan data UMR tahun 1996-2010 yang dipublikasikan oleh BPS.

5) UU No 13 Tahun 2003 (X_5)

Merupakan regulasi mengenai ketenagakerjaan di Indonesia, dalam penelitian ini variable ini merupakan variable Dummy dengan kategori

1 = Sesudah Berlakunya UU Ketenagakerjaan Tahun 2003

0 = Sebelum Berlakunya UU Ketenagakerjaan tahun 2003



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Keadaan Geografis

Provinsi Sumatera Barat terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Utara

Sebelah Selatan : Provinsi Bengkulu

Sebelah Barat : Samudera Hindia

Sebelah Timur : Provinsi Riau dan Jambi

Secara geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara $0^{\circ}54'$ lintang utara dan $3^{\circ}3'$ lintang selatan serta $98^{\circ}36'$ dan $101^{\circ}53'$ bujur timur, dengan luas daerah sekitar 42,2 ribu km^2 , dan luas tersebut setara dengan 2,27 % dari luas negara Republik Indonesia. Sementara luas perairan lautnya diperkirakan 186.500 km^2 dengan panjang garis pantainya 2.420.357 km, ini berarti Provinsi Sumatera Barat kaya akan sumber daya alam darat dan laut. Terdapat enam kabupaten dan kota yang langsung berbatasan dengan pantai yaitu kabupaten Pasaman Barat, Agam, Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Padang. Dengan garis pantai sepanjang itu Sumatera Barat mempunyai potensi perikanan dan kelautan sangat besar tapi produksi ikan lautnya masih 35% yang tereksplorasi.

Sebagian daerah Sumatera Barat memiliki topografi pegunungan. Kondisi alamnya masih diliputi oleh kawasan lindung yang mencapai sekitar 44,5% dari luas keseluruhan lahan. Sementara areal yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya baru tercatat sebesar 23.472,6 km^2 atau sekitar 55% dari kawasan

keseluruhannya. Besarnya areal kawasan hutan lindung menunjukkan bahwa Sumbar menjadi salah satu daerah tangkapan hujan atau biasa disebut *water catchment* bagi daerah sekitarnya. Disamping sebagai paru-paru dunia, propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang kaya dengan sumber keanekaragaman hayatinya.

4.2 Perkembangan Perekonomian Makro di Sumatera Barat

1) Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu cara untuk menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian yang dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domesti Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi mempunyai arti penting bagi pelaku ekonomi dalam mengambil kebijakan yang akan mereka. Salah satu indikator untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah PDRB. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto bila dibagi dengan jumlah penduduk akan menggambarkan nilai PDRB perkapita atau tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah. PDRB perkapita merupakan nilai seluruh produk dan jasa yang dihasilkan di sebuah negara dalam suatu tahun, dibagi dengan rata-rata jumlah penduduk dalam tahun yang sama (BPS).

Walaupun terjadi penurunan laju pertumbuhan perekonomian secara nasional yang sangat drastis pada tahun 1998 yaitu sebesar -13,13 persen dan perekonomian daerah Sumatera Barat juga ikut mengalami penurunan sebesar -

6,78 persen yang disebabkan oleh krisis moneter yang kemudian berlanjut menjadi krisis ekonomi yang bermula pada pertengahan tahun 1997. Namun secara keseluruhan perkembangan perekonomian di Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2000 sampai 2010.

Table 4.1
Jumlah dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2000
Provinsi Sumatera Barat 1996-2010

TAHUN	PDRB Harga Konstan tahun 2000 (dalam juta rupiah)	Laju Pertumbuhan	PDRB perkapita
1996	22,139,098.61	7.87	5.165.956.17
1997	23,275,995.58	5.11	5.726.040.69
1998	21,655,264.00	-6.73	5.206.900.34
1999	22,392,500.53	1.33	5.259.772.59
2000	22,889,614.05	3.84	5.416.274,15
2001	23,727,373.93	3.66	5.591.449,99
2002	24,840,187.76	4.69	5.790.730,04
2003	26,146,781.63	5.26	5.866.695,33
2004	27,574,395.92	5.47	6.070.879,68
2005	29,159,480.53	5.73	6.393.820,89
2006	30,949,945.10	6.14	6.681.547,82
2007	32,912,968.59	6.34	7.006.092,39
2008	35,007,921.57	6.37	7.349.820,28
2009	36,464,583.00	4.16	7.552.772,77
2010	36,683,274.00	5.93	7.569.807,91

Sumber : Data diolah dari Sumatera Barat Dalam Angka berbagai tahun

Krisis moneter yang melanda kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara pada tahun 1997 telah berkembang menjadi krisis ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan segala bidang di Indonesia. Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing sangat merosot tajam yang mengakibatkan kenaikan harga barang sehingga sangat membebani masyarakat.

ketidakstabilan politik dan keamanan yang berpuncak pada runtuhnya orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto

Pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Barat mulai menunjukkan perkembangan yang positif dengan terjadinya peningkatan pertumbuhan sebesar 0,85 persen dan pendapatan perkapita sebesar Rp. 5,79 juta. Keadaan ini terus membaik sampai tahun 2008 pertumbuhan ekonomi terus meningkat sehingga menjadi 6,37 persen dengan pendapatan perkapita sebesar Rp. 7,35 juta seiring dengan perbaikan ekonomi secara nasional. Di tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sempat mengalami penurunan menjadi 4,16%, dan kembali naik menjadi 5,93% dengan pendapatan perkapita sebesar Rp. 7,57 juta pada tahun 2010.

2) Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat

Investasi yang biasa juga disebut dengan penanaman modal atau pembentukan modal dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan dan pembelian perlengkapan produksi untuk menambah kapasitas produksi di masa yang akan datang. Investasi dapat dibedakan atas dua yaitu investasi pemerintah dan investasi swasta.

Investasi atau penanaman modal merupakan langkah awal dari kegiatan produksi dan kegiatan awal pembangunan. Penanaman modal dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Investasi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat ataupun pihak swasta tetapi juga dari pemerintah.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat perkembangan investasi di Sumatera Barat baik investasi swasta maupun investasi pemerintah mengalami fluktuasi dari

tahun ke tahun. Pada tahun 1998 investasi mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu.

Tabel 4.2
Nilai Investasi Pemerintah Atas Dasar Harga Konstan 2000
dan Realisasi PMDN / PMA
Provinsi Sumatera Barat. Tahun 1996-2010

Tahun	Investasi pemerintah (Rp Milyar)	PMDN (Juta Rupiah)	PMA US \$ (000)
1996	6.465,31	256816.00	30685.00
1997	6.362,36	421170.00	28177.00
1998	5.466,50	685383.00	42286.00
1999	4.402,01	348030.00	34900.00
2000	4.686,00	18773.00	61326.92
2001	4.736,14	183978.14	107590.89
2002	4.785,54	348234.00	118551.84
2003	4.934,28	204464.89	29339.89
2004	5.091,19	631733.33	29532.64
2005	5.388,13	607061.37	85568.91
2006	5.604,65	234856.82	87423.70
2007	5.824,27	58511.10	7028.76
2008	6.112,93	608917.90	20626.32
2009	6.344,16	761617.90	20994.06
2010	6.567,29	398269.06	17807.96

Sumber : Investasi dan Icor Sumatera Barat 1995-2010

Dari tabel 4.2 dapat juga dilihat bahwa kegiatan perinvestasian di Sumatera Barat mengalami gangguan pada tahun 2007, dimana angka realisasi PMDN dan juga PMA mengalami penurunan yang cukup pesat dibanding tahun-

tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi oleh krisis ekonomi dunia yang terjadi pada saat tersebut, sehingga para investor banyak yang enggan dalam menanamkan modalnya, terbukti pada tahun 2007 ini investasi yang terjadi tidak berkorelasi terhadap pertumbuhan kredit perbankan, diperkirakan investasi yang terjadi dibiayai oleh pengusaha, dimana pada tahun 2007 banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami keuntungan terutama perusahaan di bidang perkebunan, komoditi-komoditi seperti CPO dan karet pada tahun 2007 mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan (Kajian Ekonomi Regional Sumbar, 2007).

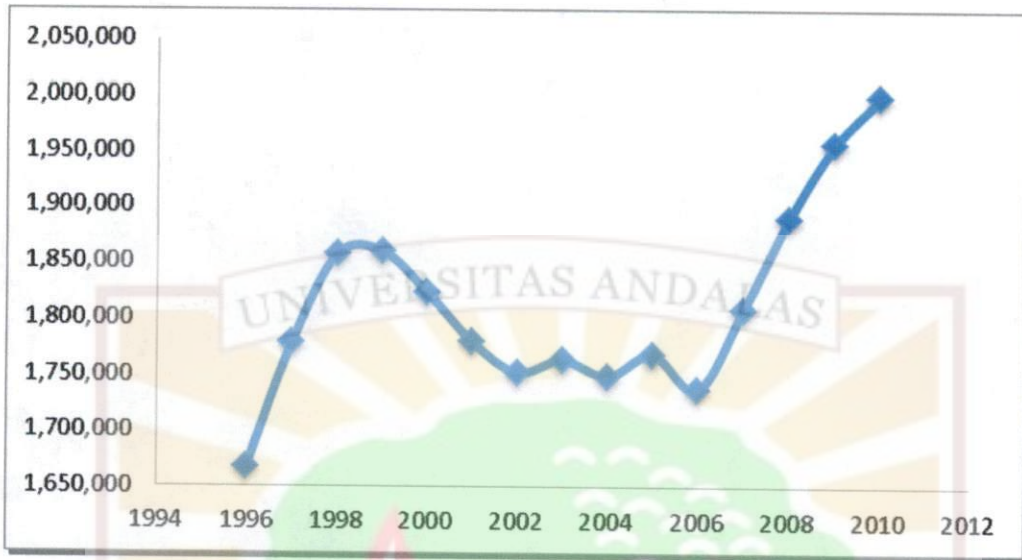
3) Perkembangan Kesempatan Kerja di Sumatera Barat

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara atau daerah yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi S, 2003).

Kesempatan kerja dapat dihitung melalui jumlah angkatan kerja yang bekerja di suatu daerah, berikut adalah data kesempatan kerja di Sumatera Barat tahun 1995-2010.

Grafik 4.2

Perekembangan Kesempatan Kerja di Sumatera Barat



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tren perkembangan kesempatan kerja di Sumatera Barat mengalami kenaikan secara fluktuatif. Pada gambar diatas dapat dilihat pada tahun 2000 kesempatan kerja di Sumatera Barat mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh efek dari krisis ekonomi pada akhir dekade 1990aa, selain itu pada awal tahun 2000 merupakan tahun transisi dimana terjadinya peralihan system pemerintahan dimana, pada tahun 2000 merupakan era dimulainya otonomi daerah. Kemudian kesempatan kerja kembali mengalami kenaikan secara signifikan semenjak tahun 2006.

Tabel 4.3
Perkembangan Kesempatan Kerja Di Sumatera Barat
Tahun 1995-2010

Tahun	Kesempatan Kerja
1995	1,667,354
1996	1,778,378
1997	1,856,880
1998	1,859,519
1999	1,823,061
2000	1,779,367
2001	1,752,415
2002	1,763,245
2003	1,749,020
2004	1,768,366
2005	1,737,427
2006	1,808,275
2007	1,889,406
2008	1,956,378
2009	1,998,922
2010	2,041,454

Sumber : BPS, Sumatera Barat Dalam Angka

Di Sumatera Barat, jumlah penduduk yang bekerja mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, karena secara langsung terlibat dalam proses produksi. Struktur perekonomian di Sumatera Barat secara umum memiliki kelebihan dalam jumlah tenaga kerja., sehingga dibutuhkan kebijakan yang strategis agar kelebihan tersebut tidak menjadi permasalahan yang lebih lanjut.

4.5 Upah Minimum Regional di Sumatera Barat

Kondisi di pasar kerja selalu terkait dengan kebijakan upah minimum dan peranan tripartit Dewan Pengupahan. Tripartit Dewan Pengupahan dapat membuat keputusan bersama tentang tingkat upah antara serikat pekerja dengan pihak pemberi kerja. Dalam hubungan tersebut pemerintah memiliki peranan penting

untuk menetapkan upah minimum yang mengikat bagi para pemberi kerja di satu pihak dan pekerja pada pihak lain.

Upah minimum adalah upah permulaan yang diterima oleh pekerja atau buruh yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh pekerja pada waktu pertama kali dia diterima bekerja. Jika upah meningkat maka pekerja dapat meningkatkan nafkah bagi keluarganya. Upah Minimum Regional (UMR) banyak dinikmati oleh para pekerja pemula dan tidak terampil sehingga upah yang mereka terima tidak terlalu rendah.

Tabel 4.4
Perkembangan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat.
Tahun 1995-2010

Tahun	Nilai UMR (Rupiah per bulan)
1995	97,000
1996	108000
1997	119010
1998	137000
1999	160000
2000	200000
2001	250000
2002	385000
2003	435000
2004	480000
2005	540000
2006	650000
2007	725000
2008	800000
2009	880000
2010	1055000

Sumber : Depnakertrans

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa UMR terus meningkat. Pada tahun 2000 UMR hanya sebesar Rp 200.000 per bulan. Namun pada tahun 2010 telah mencapai Rp

1.055.000 per bulan. Peningkatan UMR yang ditetapkan pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Antara tahun 1996-2010 UMR di Sumbar tidak pernah mengalami penurunan.

Dari tabel di atas kita bisa menyimpulkan bahwa setiap tahun yaitu dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2010 upah minimum selalu mengalami kenaikan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah provinsi terkait untuk menyesuaikan laju inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga-harga terhadap pendapatan tenaga kerja. Pada tahun 2000 upah minimum hanya sebesar Rp. 200.000, yang harus diterapkan dalam sistem pengupahan oleh pemberi kerja kepada pekerjanya hingga pada tahun 2010 upah minimum adalah Rp. 1.055.000. Pertumbuhan peningkatan kenaikan upah minimum di Sumatera barat terjadi pada tahun 2002, yaitu sebesar 179 persen. Ini lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu pada 2001 yang hanya 125 persen. Hal ini terjadi karena penyesuaian atas dampak krisis ekonomi yang terjadi pada akhir 1998, mengingat pada masa krisis ekonomi daya beli masyarakat rendah karena dorongan inflasi yang tinggi, sehingga menuntut kebutuhan hidup minimum yang lebih besar. Pada tahun 1996 sampai dengan 2002 terjadi pertumbuhan tingkat upah minimum yang cukup tinggi dimana tahun 2002 merupakan pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 179 %. Hal ini bisa menjadi gambaran bahwa masih tingginya tingkat inflasi pada masa itu. Berikut pada tahun 2006 terjadi kenaikan upah sebesar 235.20 %. Hal ini sebagai kebijakan yang di ambil menyusul pada akhir 2005 terjadi kenaikan BBM (bahan bakar minyak). Laju kenaikan upah Sumatera Barat sendiri dalam periode 2000-2010 naik secara drastis yaitu sebesar 286.97%.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisa Tren Perkembangan Kesempatan Kerja di Sumatera Barat

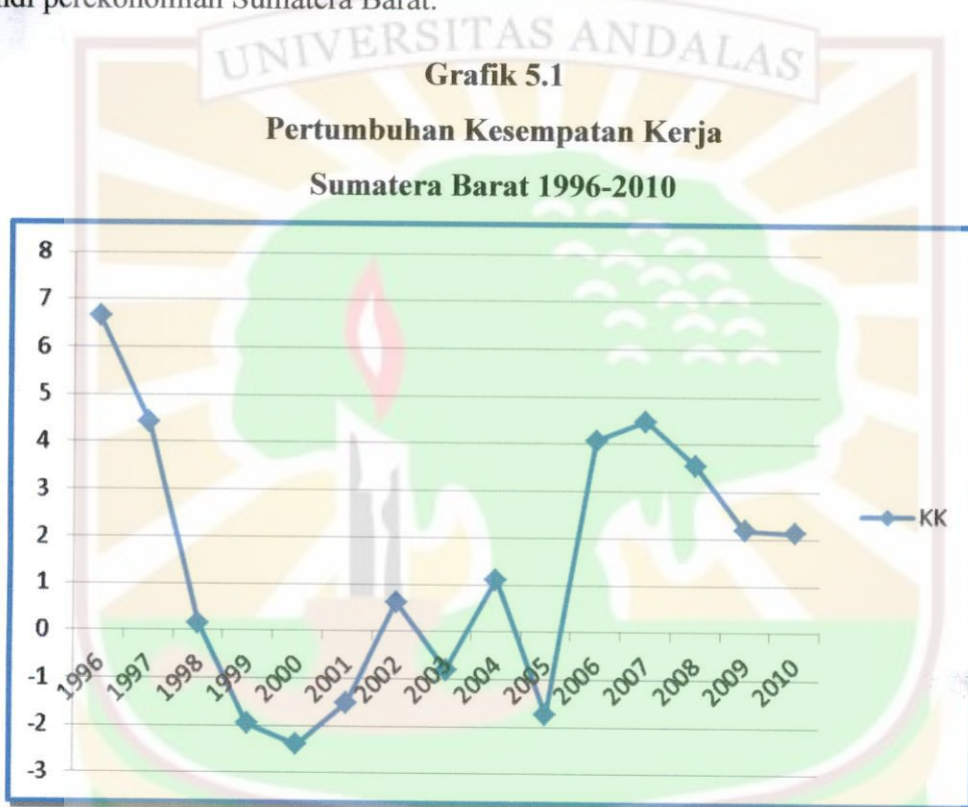
Jumlah kesempatan kerja di Sumatera Barat pada 15 tahun terakhir ini memiliki peningkatan yang bersifat fluktuatif, dimana setiap tahunnya rata-rata kesempatan kerja mengalami kenaikan sebesar 1.39 persen, pergerakan yang fluktuatif ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adalah pengaruh dari kondisi makroekonomi di Sumatera Barat yang mengalami pasang surut dalam rentang waktu 15 tahun belakangan ini.

Tabel 5.1
Pertumbuhan Kesempatan Kerja
Di Sumatera Barat
1996-2010

Tahun	Kesempatan Kerja	Pertumbuhan (%yoy)
1996	1,778,378	6.65
1997	1,856,880	4.41
1998	1,859,519	0.14
1999	1,823,061	-1.96
2000	1,779,367	-2.40
2001	1,752,415	-1.51
2002	1,763,245	0.62
2003	1,749,020	-0.81
2004	1,768,366	1.11
2005	1,737,427	-1.75
2006	1,808,275	4.08
2007	1,889,406	4.49
2008	1,956,378	3.54
2009	1,998,922	2.17
2010	2,041,454	2.13

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sejak tahun 1996 sampai tahun 2000 pertumbuhan kesempatan kerja mengalami penurunan, puncaknya pada akhir tahun 1990an angka kesempatan kerja mengalami penurunan sebesar -2,40 persen dibanding tahun 1999, hal ini merupakan dampak dari terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998 yang menimbulkan dampak negatif terhadap sendi-sendi perekonomian Sumatera Barat.



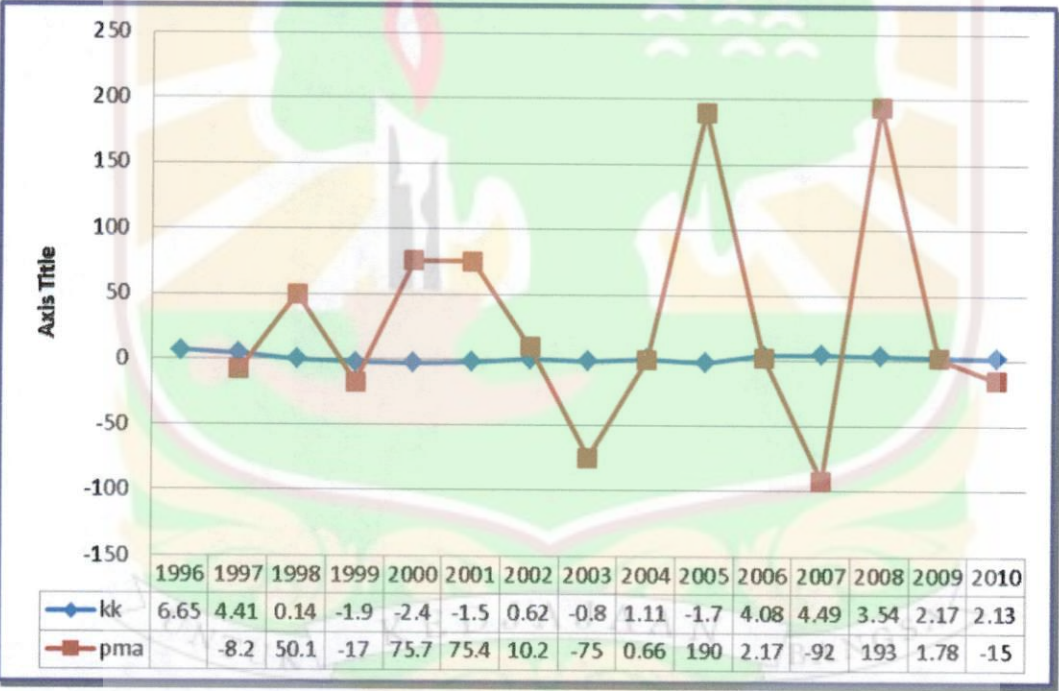
Sumber : data diolah

Memasuki awal tahun 2000 angka kesempatan kerja mengalami kenaikan kembali setelah masa pasca krisis ekonomi pada tahun 1997, namun belum mengalami kondisi yang stabil, hal ini diduga karena kondisi perekonomian Sumatera Barat pada masa ini belum begitu stabil, hal ini bisa dilihat dari berbagai indikator, salah satu indikator ekonomi yang mempengaruhi angka kesempatan kerja dalam penelitian ini adalah investasi, berikut adalah perbandingan pertumbuhan investasi dengan pertumbuhan kesempatan kerja

swasta melakukan persiapan untuk menghadapi pasar bebas, selain tahun 2005 tren antara investasi pemerintah dan kesempatan kerja mengalami pergerakan yang sama.

Sedangkan antara PMA dan kesempatan kerja juga saling berhubungan, meskipun pergerakannya tidak sekuat antara Investasi pemerintah dengan kesempatan kerja, hal ini disebabkan karena PMA lebih bersifat kepada investasi padat modal sehingga sedikit dalam menyerap tenaga kerja.

Grafik 5.3
Perbandingan Tren Pertumbuhan PMA dengan Kesempatan Kerja (yoy) di Sumatera Barat 1996-2010



Sumber : Data Diolah

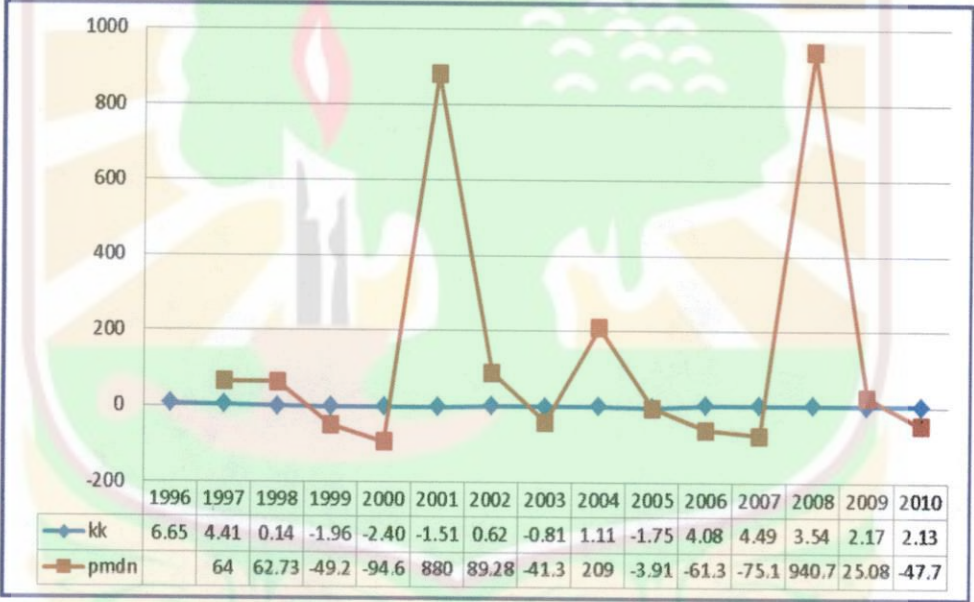
Dari kedua grafik tersebut bisa kita baca bahwa sebelum tahun 2000 PMA dan Kesempatan kerja sama-sama mengalami penurunan yang cukup tajam, dimana hal ini disebabkan oleh adanya goncangan ekonomi pada tahun 1998 yang menyebabkan aktifitas perekonomian menjadi sangat kacau, ditandai dengan

terjadinya inflasi yang mencapai tiga digit. Pada awal terjadinya krisis PMA mengalami penurunan sebesar 8,17 persen sedangkan kesempatan kerja mengalami kenaikan sebesar 4 persen namun pertumbuhannya mengalami penurunan sebelum krisis ekonomi, memasuki tahun 2000 kesempatan kerja mengalami perbaikan dimana pada grafik mulai mengalami kenaikan sedangkan PMA juga mengalami kenaikan namun memasuki tahun 2003 PMA kembali mengalami penurunan sebesar 75 persen, ditahun yang sama kesempatan kerja juga mengalami penurunan sebesar 0,81 persen, pada tahun 2005 pertumbuhan kesempatan kerja mengalami penurunan yang sangat tajam dimana kesempatan kerja mengalami penurunan mencapai 2 persen, sedangkan investasi mengalami kenaikan, hal ini berlawanan sekali, namun hal ini wajar terjadi karena dampak investasi itu bersifat jangka panjang dalam memacu penyerapan tenaga kerja hal ini sesuai dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Tambunan (2001) yang menyatakan bahwa investasi akan mendorong kesempatan kerja dan peningkatan terhadap pendapatan dalam jangka panjang.

Sedangkan tren PMDN juga bersifat fluktuatif, memasuki awal krisis ekonomi pada tahun 1997 PMDN pertumbuhan PMDN cukup mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, puncaknya pada tahun 1999 PMDN Sumatera Barat mengalami penurunan sebesar 42,2 persen dari tahun 1998, hal ini merupakan dampak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, hal yang sama juga terjadi pada kesempatan kerja, namun pada tahun 2001 PMDN mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pertumbuhannya mencapai 880,01 persen hal ini terjadi karena terjadi perubahan kebijakan ekonomi di Sumatera Barat memasuki era otonomi daerah, PMDN meningkat karena pada era otonomi

daerah setiap daerah memiliki hak untuk mengatur kebijakan perekonomiannya tanpa adanya interfensi dari pemerintah pusat sehingga daerahpun bebas dalam membuat kebijakan terkait mengenai investor, pada tahun ini kesempatan kerja mengalami penurunan sebesar 1,51 persen namun lebih baik dari tahun sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 2,41 persen, kurangnya pengaruh PMDN terhadap kesempatan kerja dikarenakan oleh dampak investasi yang lebih bersifat jangka panjang.

Grafik 5.4
Perbandingan Tren Pertumbuhan
PMDN dengan Kesempatan Kerja di Sumatera Barat
1996-2010



Sumber ; Data Diolah

5.2 Identifikasi Variabel

Selain dengan menguraikannya secara deskriptif, Untuk melihat seberapa besar pengaruh Investasi pemerintah, PMA, PMDN, UMR dan keluarnya UU No 13 tahun 2003 terhadap perkembangan kesempatan kerja di Sumatera Barat maka dapat dilihat dengan menggunakan analisa regresi linier berganda yang menggunakan data yang telah dikeluarkan oleh BPS Sumatera Barat. dalam

penelitian ini data yang digunakan adalah data tenaga kerja yang bekerja di Sumatera Barat, data investasi dan *ICOR* di Sumatera Barat selama tahun 1996 sampai tahun 2010.

Untuk mengetahui variasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan uji koefisien determinasi (R^2), sedangkan *F* – test digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh seluruh variabel bebas (independent variable) terhadap variabel tidak bebas (dependent variable). Untuk setiap variabel dilakukan *T*–test untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel.

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah investasi pemerintah, PMA, PMDN dan data UMR Propinsi Sumatera Barat, ditambah dengan satu variabel *Dummy* terkait dengan keluarnya UU No 13 tahun 2003 mengenai masalah ketenagakerjaan di Indonesia, sedangkan variabel independennya adalah jumlah kesempatan kerja di Sumatera Barat selama tahun 1996-2010.

5.3 Penemuan Empiris

Selain mencoba dengan uraian yang bersifat deskriptif, penelitian ini juga menggunakan analisis regresi linear berganda yang terlebih dahulu dirubah kedalam bentuk logaritma, pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS 16. Pengolahan data dilakukan dengan meregresi variabel dependent dengan variabel independent. Analisa regresi berguna untuk mengkaji pengaruh Investasi pemerintah, investasi swasta (PMA dan PMDN), kebijakan upah minimum regional dan keluarnya UU No 13 tahun 2003 mengenai regulasi ketenagakerjaan di Indonesia terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat.

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut :

$$Y = 4.819 + 0.281 \text{ Log}x_1 + 0.005 \text{ Log}x_2 + 0.003 \text{ Log}x_3 - 0.075 \text{ Log}x_4 - 0.130 \text{ Log}x_5$$

t test	(3.844)	(0.469)	(0.327)	(-3.591)	(-2.134)
--------	---------	---------	---------	----------	----------

R^2 = 0.821

Adjusted R^2 = 0.721

F-test = 8.238

F-tabel = 2.61

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.821. Hal ini berarti bahwa 82.1 % kesempatan kerja dapat dijelaskan oleh investasi pemerintah, investasi swasta (PMA dan PMDN), UMR, UU No 13 tahun 2003. Sedangkan sisanya sebesar 17.9 % lagi dijelaskan oleh variable lain yang tidak masuk ke dalam model.

Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap dependen secara keseluruhan maka dilakukan dengan uji statistik. Nilai uji statistik-F yang diperoleh adalah sebesar 8.238 sedangkan F-tabel yang dihitung dengan cara $df_1 = k - 1$, dan $df_2 = n - k$, dimana k adalah jumlah variabel dependen dan variabel independen, sedangkan n adalah jumlah data sehingga didapatkan nilai f-tabel sebesar 2.261. Hal ini berarti bahwa nilai $F\text{-test} > F\text{-tabel}$ dan bisa dinyatakan bahwa nilai investasi pemerintah, investasi swasta (PMA dan PMDN), UMR dan keluarnya regulasi ketenagakerjaan berupa UU No 13 tahun 2003 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah kesempatan kerja di Sumatera Barat.

Standard Error of the Estimate (SEE) pada penelitian ini adalah sebesar 0.0117148 Nilai ini berfungsi untuk menguji apakah model regresi sudah

berfungsi dengan baik sebagai prediktor atau belum. Untuk itu, nilai SEE harus dibandingkan dengan nilai simpangan baku variabel dependent, yaitu sebesar 0.721. Nilai SEE ternyata lebih kecil daripada nilai simpangan baku, maka model regresi yang digunakan dapat dijadikan sebagai prediktor kesempatan kerja. Nilai SEE juga menunjukkan tingkat kesalahan model yang digunakan untuk menjelaskan variabel dependent. Dengan demikian, tingkat kesalahan model yang digunakan dalam menjelaskan faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja di Sumatera Barat hanya sebesar 0.0117148. Semakin kecil nilai SEE, maka akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependent.

5.4 Uji Statistik

5.4.1 Pengaruh Investasi Pemerintah Terhadap Kesempatan Kerja di Sumatera Barat

Untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilakukan uji-T. Uji signifikan secara parsial pada masing-masing variabel bebas dilihat dari besarnya signifikansi T setiap variabel bebasnya. Nilai T-test yang diperoleh dari variabel nilai Investasi Pemerintah adalah 3.844 dan T tabel dihitung dengan cara $df1 = \frac{\alpha}{2}$ dan $df2 = n - k$ sehingga nilai T tabel sebesar 1.833 berarti $T\text{-test} > T\text{-tabel}$. Hasil ini menunjukkan bahwa investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan kesempatan kerja di Sumatera Barat.

Koefisien regresinya adalah sebesar 0.281 yang berarti investasi pemerintah akan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan kesempatan kerja di Sumatera Barat. Dimana setiap peningkatan 1% Investasi Pemerintah akan

meningkatkan kesempatan kerja di Sumatera Barat sebanyak 0.281 %, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Dari hasil ini bisa dilihat bahwa investasi pemerintah memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan kesempatan kerja di Sumatera Barat.

Hal ini menunjukan bahwa hasil dari regresi sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa investasi pemerintah berhubungan positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Hasil ini sejalan dengan Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ari Gunawan (2006), yang menemukan adanya hubungan positif investasi dengan penyerapan tenaga kerja.

5.4.2 Pengaruh Investasi Swasta (PMA dan PMDN) Terhadap Kesempatan Kerja di Sumatera Barat

Nilai T-test yang diperoleh dari PMA Sumatera Barat adalah 0.469 sedangkan nilai T-tabel adalah 1.83 sehingga $T\text{-hitung} < T\text{-tabel}$. Dengan demikian nilai PMA Sumatera Barat memiliki hubungan yang positif dengan kesempatan kerja namun tidak signifikan.

Koefisien regresinya adalah sebesar 0.005, artinya adalah setiap kenaikan investasi swasta sebesar 1 % akan meningkatkan kesempatan kerja sebesar 0.005%. Angka ini tidak terlalu signifikan namun tetap memiliki pengaruh walaupun dalam skala yang kecil. Hal ini mungkin disebabkan investasi swasta di Sumatera Barat masih terarah kepada investasi padat modal yang kurang dalam menyerap tenaga kerja.

Sedangkan nilai T Test yang diperoleh dari PMDN adalah sebesar 0.327 sedangkan nilai T-tabel adalah 1.83 sehingga $T\text{-hitung} < T\text{-tabel}$. Dengan

demikian nilai PMDN Sumatera Barat memiliki hubungan yang positif dengan kesempatan kerja namun tidak signifikan.

Koefisien regresinya adalah sebesar 0.003, artinya adalah setiap kenaikan investasi swasta sebesar 1 % akan meningkatkan kesempatan kerja sebesar 0.003 %. Angka ini tidak terlalu signifikan namun tetap memiliki pengaruh walaupun dalam skala yang kecil.

Dari kedua investasi yakni PMA dan PMDN didapatkan kesimpulan bahwa kedua variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan angka kesempatan kerja, hal ini disebabkan karena investasi memiliki efek jangka panjang terhadap pertumbuhan kesempatan kerja (Tambunan, 2001), artinya adalah investasi tahun ini belum tentu akan menaikkan penyerapan tenaga pada tahun tersebut, dampaknya mulai akan terasa pada tahun-tahun selanjutnya, kenyataan inilah yang menyebabkan PMA dan PMDN tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja.

5.4.3 Pengaruh Ketetapan Upah Minimum Regional Terhadap Kesempatan Kerja Di Sumatera Barat

Dari hasil uji yang dilakukan diperoleh nilai t-test variabel UMR sebesar -3.591, dari pengujian nilai t dengan penggunaan uji kasus dua arah didapatkan bahwa nilai t-hitung > t tabel. Artinya antara UMR dengan kesempatan kerja memiliki hubungan yang negative dan signifikan, ini dapat dilihat dari koefisien regresinya sebesar -0.075 dimana setiap kenaikan UMR sebesar 1 % akan menurunkan kesempatan kerja sebesar 0.075 % dengan asumsi variabel lain tetap.

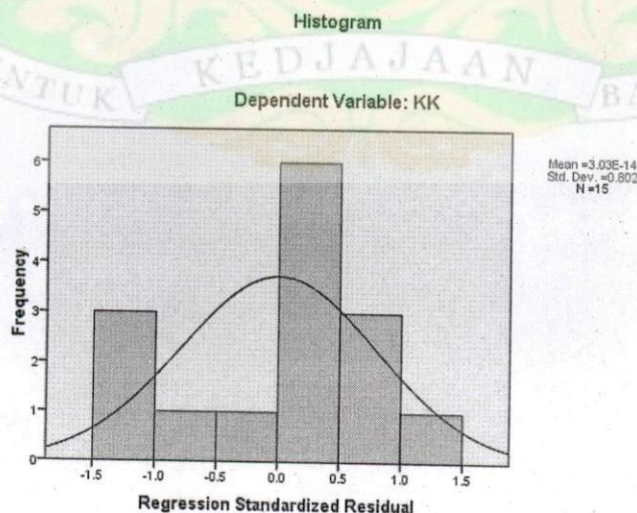
5.4.4 Pengaruh Keluarnya UU No 13 Tahun 2003 terhadap Kesempatan Kerja di Sumatera Barat

Nilai T-test yang diperoleh dari variable Dummy yakni mengenai UU Ketenagakerjaan tahun 2003 adalah -2.134 sedangkan nilai T-tabel dengan uji kasus 2 arah adalah -0.183 sehingga $T\text{-hitung} < T\text{-tabel}$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa UU ketenagakerjaan tahun 2003 memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat. Hal ini bisa dilihat dari koefisien regresinya yaitu -0.030 artinya pelaksanaan UU ini telah mengurangi penyerapan tenaga kerja sebesar 0.030 % dibanding sebelum pelaksanaan UU ini, sehingga bisa didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan UU Ketenagakerjaan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penyerapan ketenagakerjaan secara positif

5.5 Uji Asumsi Klasik

5.5.1 Uji Normalitas Sebaran Data

Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas Sebaran Data



Pada uji normalitas jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas. Dari output yang telah diperoleh terlihat bahwa penyebaran data (titik-titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi distribusi normal.

5.5.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (variabel bebas). Pada model regresi yang baik tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas, salah satunya dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

Hasil pengujian model regresi yang diperoleh menunjukkan nilai-nilai *Tolerance* dan VIF untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Hasil Uji Multikoloniartitas

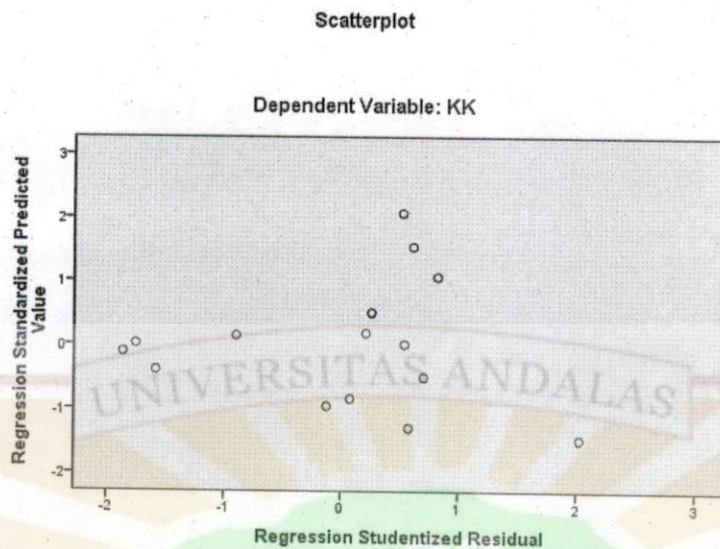
Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIV
1	(Constant)		
	IP	.556	1.768
	PMA	.594	1.683
	PMDN	.771	1.297
	UMR	.196	5.098
	UU Ketenagakerjaan 2003	.192	5.211

Tabel 5.1 menunjukkan nilai *Tolerance* untuk semua variabel independen di atas 0,10 dan nilai VIF untuk semua variabel independen juga dibawah 10. Hal ini sesuai dengan syarat tidak terjadinya multikoloniartitas

5.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memastikan dalam model regresi terjadi kesamaan *variance* (homoskedastisitas) dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan residualnya.

Gambar 5.2 Uji Heterosdekastisitas



Berdasarkan gambar 5.2 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dan model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan masukan variabel independen.

5.5.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji ini dilakukan karena sampel yang digunakan untuk observasi merupakan data timeseries. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson ($D-W$ test), dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.2
Hasil Nilai Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.906 ^a	.821	.721	0.0117148	2.231

Dari hasil estimasi diatas, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2.231. Sedangkan dari tabel Durbin-Watson untuk sampel 15 ($n = 15$) dengan variabel independent 5 ($k = 5$), maka diperoleh nilai $dL = 0,56$ dan $dU = 2,21$, sehingga nilai dw tersebut dapat diklasifikasikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 5.3 Durbin-Watson

No	Nilai dw	Keterangan
1	$d < 0,56$	ada autokorelasi positif
2	$0,56 < d < 2,21$	tidak ada kesimpulan
3	$2,21 < d < 2,79$	tidak ada autokorelasi
4	$2,79 < d < 3,01$	tidak ada kesimpulan
5	$d > 3,01$	ada autokorelasi negative

Sumber: Gujarati (1999)

Dengan demikian pada Tabel 5.3 dapat kita lihat bahwa nilai Durbin-Watson terletak antara $dU < d < 4-dU$, yaitu $2,21 < 2,32 < 2,79$ dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi (no autocorrelation) pada model regresi.

5.6 Impilikasi Kebijakan

5.6.1 Investasi Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari uji statistik sebelumnya didapatkan koefisien regresi investasi pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 0.281 yang berarti investasi pemerintah akan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan kesempatan kerja di Sumatera Barat . Dimana setiap peningkatan 1% Investasi Pemerintah akan meningkatkan kesempatan kerja di Sumatera Barat sebanyak 0.281 %, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Dari hasil ini bisa dilihat bahwa investasi pemerintah memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan kesempatan kerja di Sumatera Barat.

Dengan adanya temuan diatas dapat diketahui bahwa sesungguhnya investasi yang dilakukan pemerintah memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sumatera barat. Maka impilkasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan agar investasi pemerintah mengalami kenaikan di tahun-tahun selanjutnya dengan cara menemukan formulasi kebijakan yang strategis sehingga peningkatan penyerapan tenaga kerja lebih maksimal lagi
2. Mengarahkan investasi kepada proyek-proyek yang padat karya sehingga penyerapan tenaga kerja bisa lebih maksimal lagi dibanding dengan investasi yang diarahkan ke arah padat modal

5.6.2 Investasi Swasta (PMA dan PMDN) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan ternyata investasi swasta belum signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sehingga pemerintah seharusnya mengkaji ulang lagi bagaimana investasi swasta (PMA dan PMDN) ini di Sumatera Barat, oleh karena itu menurut penulis implikasi kebijakan yang dapat diambil adalah sebagai berikut

1. Diperlukan strategi peningkatan ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga akan mendorong penanaman modal lebih besar lagi di Sumatera Barat
2. Pemerintah perlu mengkaji ulang lagi mengenai regulasi yang ada dalam penanaman modal di Sumatera Barat, diantaranya adalah fasilitas keringanan bagi investor yang baru menanamkan modalnya seperti pemberian tax holiday untuk beberapa tahun, hal ini sudah berlaku di beberapa Negara di Asean seperti Myanmar dan Vietnam. Dengan demikian minat investor akan semakin bertambah untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat.

5.6.3 Pengaruh Kebijakan UMR terhadap penyerapan tenaga kerja

Hasil pengujian penelitian ini sejalan dengan model neo klasik dimana kenaikan upah akan mengurangi kesempatan kerja, koefisien regresinya adalah sebesar -0.075. hal ini menunjukkan bahwa kenaikan UMR memiliki hubungan yang negatif dan signifikan. isu penetapan UMR memang merupakan isu yang kontroversial dimana upah minimum akan mendorong terjadinya distorsi dalam

pasar tenaga kerja. Artinya dengan ketentuan upah minimum, maka buruh mempunyai kekuatan monopoli yang cenderung melindungi buruh yang telah bekerja dalam industri itu. Kekuatan serikat buruh yang cenderung memaksimumkan pendapatan dari buruh yang ada akan mendiskriminasi pendatang baru dalam pasar tenaga kerja. Pandangan serupa valid dalam kondisi dimana perusahaan tidak mempunyai kekuatan monopsoni untuk menekan buruh. Jika ada monopsoni dalam pasar tenaga kerja, maka pengaruh ketentuan upah minimum dapat mendorong peningkatan kesempatan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian ini setidaknya didapatkan kesimpulan bahwa pemerintah tidaklah harus fokus pada kebijakan penetapan upah saja karena walau bagaimanapun kebijakan ini memiliki dampak yang negatif terhadap perkembangan penyerapan tenaga kerja, pemerintah seharusnya fokus kepada kebijakan-kebijakan yang bisa meningkatkan produktifitas setiap unit usaha, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi asing, sehingga dalam jangka panjang akan memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja kedepannya.

5.6.4 UU Ketenagakerjaan No 13 Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari hasil Uji statistik yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa UU Ketenagakerjaan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, kemungkinan hal ini disebabkan karena masih adanya kekurangan-kekurangan didalam UU tersebut, dimana isi UU tersebut banyak memberatkan pihak pengusaha jika pengusaha tersebut memiliki jumlah pekerja dalam jumlah yang banyak, sehingga memberikan kecendrungan negatif para

pengusaha dalam melakukan perekrutan baru. Beberapa isi UU tersebut antara lain adalah; Pertama, Pasal 106 yang menyatakan bahwa setiap pengusaha yang memiliki jumlah pegawai sebanyak 50 orang atau lebih wajib untuk mengadakan kerja sama bipartite dengan perusahaan lain dan dengan para serikat buruh untuk membuat semacam forum dan konsultasi. Hal ini secara tidak langsung akan menambah biaya tersendiri bagi para pengusaha sehingga para pengusaha cenderung untuk menjaga jumlah pekerjanya.

Kedua Pasal 144 yang didalamnya memberikan izin untuk melakukan mogok kerja . disini pengusaha dilarang untuk memberhentikan pekerja, memberikan sanksi. Tentunya hal ini akan membuat para pengusaha berpikir dua kali dalam menerima lowongan dengan jumlah yang besar karena pegawai dengan jumlah tertentu wajib membuat serikat pekerja yang bisa jadi menjadi kekuatan bagi pekerja untuk menekan perusahaan.

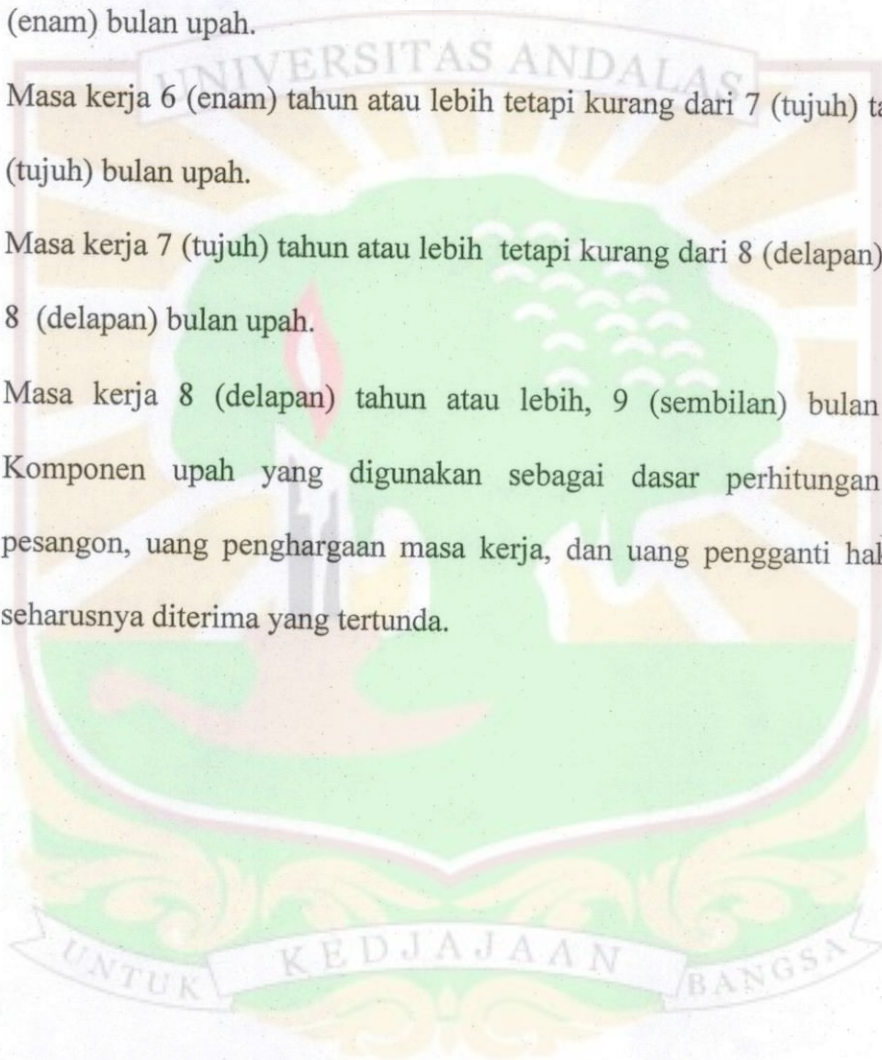
Ketiga Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja didalam Pasal 156, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam pasal ini paling minimumnya adalah sebagai berikut :

Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, pesangonnya 1 (satu) bulan upah.

- Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah
- Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

- Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah.
- Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah.
- Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
- Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah.
- Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pengujian hipotesa yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tren kesempatan kerja di Sumatera Barat sangat berhubungan sekali dengan perkembangan investasi pemerintah di Sumatera Barat, hal ini disebabkan karena investasi pemerintah di Indonesia berhubungan dengan pembangunan fisik, yang menimbulkan kesempatan kerja baru bagi masyarakat, berbeda dengan investasi swasta (PMA dan PMDN) yang memiliki tren yang tidak begitu berpengaruh dengan kesempatan kerja, hal ini terjadi karena investasi swasta di Sumatera Barat kebanyakan bersifat padat modal sehingga pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
2. Kesempatan kerja dan investasi di Sumatera Barat mengalami guncangan pada saat terjadinya krisis ekonomi, karena pada waktu itu keuangan secara nasional terkonsentrasi pada perbaikan sektor moneter, dimana pada waktu itu sektor moneter mengalami kemunduran yang drastis, yang ditandai dengan terjadinya *Hyper inflation*, Hal ini menyebabkan investasi mengalami kemunduran, sehingga banyak pengusaha yang bangkrut dan jelas akibatnya adalah terjadi PHK dimana-mana.
3. Secara keseluruhan nilai investasi pemerintah, investasi swasta, UMR dan keluarnya regulasi ketenagakerjaan berupa UU No 13 tahun 2003

berpengaruh terhadap jumlah kesempatan kerja di Sumatera Barat secara parsial. hal ini dapat dilihat dari uji statistic yakni uji F. Nilai uji statistik-F yang diperoleh adalah sebesar 8.328 sedangkan F-tabel yang dihitung dengan cara $df_1 = k-1$, dan $df_2 = n - k$, dimana k adalah jumlah variabel dependen dan variabel independen, sedangkan n adalah jumlah data sehingga didapatkan nilai f-tabel sebesar 2.261. sehingga $f_{test} > f_{tabel}$. Sehingga secara keseluruhan variabel independent berpengaruh terhadap variabel independen secara bersamaan.

4. Dari hasil uji T test yang dilakukan dapat dilihat bahwa kesempatan kerja di Sumatera Barat secara dominan dipengaruhi oleh Investasi Pemerintah dimana koefisien regresinya sebesar 0.281 artinya setiap kenaikan investasi pemerintah sebesar 1 % akan menaikkan kesempatan kerja sebesar 0.281 % dengan asumsi variabel lain tetap.
5. Dari hasil uji didalam penelitian ini didapatkan bahwa investasi swasta di Sumatera Barat memiliki pengaruh yang tidak begitu signifikan terhadap kesempatan kerja di Sumatera Barat, Hal ini terjadi karena masih besarnya ketimpangan penanaman PMDN maupun PMA di setiap wilayah di Sumatera Barat. sehingga besarnya investasi swasta belum bisa memberikan dampak positif yang berarti bagi ketenagakerjaan di Sumatera Barat selain hal itu besar kemungkinan investasi swasta di Sumatera Barat belum maksimal dikarenakan belum adanya kebijakan khusus bagi investor asing berupa pemberian fasilitas dan keamanan, sehingga para investor masih belum melihat Sumatera Barat sebagai daerah yang potensial untuk dikembangkan.

6. Keluarnya UU No 13 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2003 belum memberikan dampak positif kepada penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat. Hal ini terjadi karena banyaknya pasal-pasal didalam UU tersebut yang tidak menguntungkan pengusaha apabila memiliki pekerja dalam jumlah banyak. Hal ini memberikan kecendrungan negatif para pengusaha dalam melakukan penyerapan tenaga kerja secara umum.

6.2 Saran

Dari pembahasan, hasil pengujian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Upaya pencitraan positif terhadap iklim investasi di Sumatera Barat perlu terus digalakkan untuk meningkatkan peringkat daya saing investasi Sumatera Barat secara nasional. Berbagai upaya yang diperlukan seperti, efisisensi sistem birokrasi, perbaikan infrastruktur, aturan ketenagakerjaan, termasuk penyederhanaan sistem perizinan dan faktor lainnya.
2. Perlu adanya pemerataan realisasi proyek dari investasi swasta (PMA dan PMDN) bagi seluruh wilayah Sumatera Barat agar memberikan dampak yang positif bagi ketenagakerjaan di Sumatera Barat secara umum
3. Pemerintah hendaknya mendorong investasi yang bersifat padat karya yaitu investasi yang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat sehingga investasi yang direalisasikan memberikan dampak positif bagi situasi ketenagakerjaan di Sumatera Barat.
4. Perlunya penerapan kebijakan yang lebih strategis dibanding dengan penerapan upah minimum karena pada beberapa wilayah umumnya upah

minimum ini memiliki dampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja meskipun di Sumatera Barat dampaknya tidak begitu berarti, tetapi tetap saja upah minimum ini merupakan kebijakan yang menimbulkan dilema dalam usaha peningkatan penyerapan tenaga kerja.

5. Perlunya pengkajian ulang lebih lanjut dalam pelaksanaan UU No 13 Tahun 2003 mengingat pelaksanaan UU ini memiliki dampak negative dalam penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat. hal ini tidak mengherankan karena penerapan UU ini sempat menjadi bahan kritikan dari para pengusaha maupun dari serikat pekerja.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Ayuningsasi, Anak Agung Ketut. 2010. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 15, No. 2, 2010, ISSN 1410- 4628.
- Boediono, 1999: *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Penerbit BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Brady, David, Yunus Kaya, and Gary Gereffi. 2011. Stagnating Industrial Employment in Latin America. *Work and Occupations*. Thousand Oaks : May 2011, Vol. 38, Iss. 2, page 179.
- Deliarnov. 1995. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 1968. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Jakarta.
- _____. 1969. Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Jakarta.
- _____. 2003. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta.
- Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. 1969. Undang-Undang No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Jakarta.

Todaro, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I, Edisi Keenam.
Jakarta : Erlangga.

(Bps.go.id)

(Depnakertrans.go.id)

